

WALHI WALHI WALHI WALHI

SULAWESI TENGAH

SULAWESI UTARA

SULAWESI SELATAN

SULAWESI TENGGARA

CATATAN AKHIR TAHUN 2021

RED ALERT EKSPANSI NIKEL DI SULAWESI

WALHI REGION SULAWESI

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi mineral nikel terbesar di dunia dengan potensi terbesar berada di jantung pulau Sulawesi dan pulau pulau kecil di kepulauan Maluku utara dan Sulawesi tenggara. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia memiliki setidaknya 72 juta cadangan Nikel (Ni), termasuk Limonit¹, atau 52% dari total cadangan nikel dunia sebanyak 139.419.000 Ton Ni (Booklet Peluang Investasi Nikel Indonesia, Kementerian ESDM, 2020). Karenanya, kegiatan pertambangan nikel sebagian besar hanya tersebar di 4 provinsi, dimana terkandung 90% dari seluruh cadangan sumber nikel yang ada di Indonesia. 3 provinsi berada di Sulawesi, yaitu Sulawesi tengah, Sulawesi selatan, dan Sulawesi tenggara, serta 1 provinsi di Maluku, yaitu Maluku Utara.

Catatan ini akan mengulas tentang nikel sebagai sumber daya mineral bernilai tinggi, pertambangan nikel, dan dampak kegiatan pertambangan nikel di Sulawesi. Sebelumnya akan diuraikan tentang mengapa dan kenapa arah kebijakan terkait dengan sumber daya nikel di Sulawesi di dalam pembangunan nasional dan global. Catatan ringkas ini berangkat dari pengalaman para penggiat WALHI di Sulawesi di dalam advokasi kelangsungan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan rakyat di pedesaan.

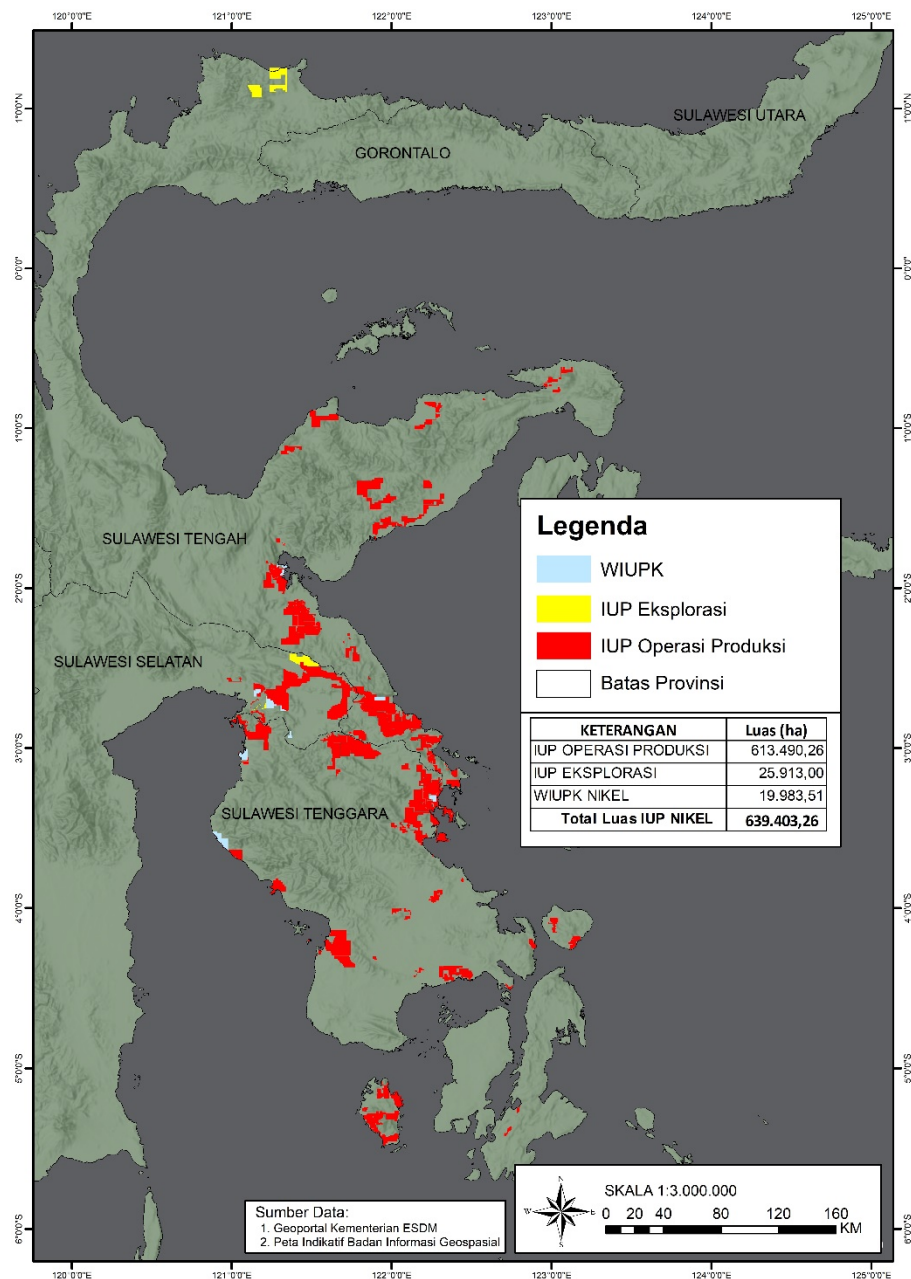
Ambisi presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen baterai nomor satu di dunia diungkapkan dalam pidato *groundbreaking* pabrik baterai Hyundai-LG di Karawang, Jawa Barat (15/09/2021). Untuk mencapai ambisi yang begitu besar, Pemerintah Indonesia terus menggenjot pertumbuhan industri pertambangan nikel dimulai dari hulu hingga hilir. Pada akhir 2021 tercatat telah terbit 293 izin usaha pertambangan dengan komoditas nikel di seluruh Pulau Sulawesi (Geoportal Kementerian ESDM, 2021), Sejalan dengan meningkatnya izin usaha pertambangan untuk komoditas nikel, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Kerusakan lingkungan, Deforestasi, perampasan ruang, hingga pemiskinan rakyat juga semakin masif terjadi. Perusahaan pertambangan dengan komoditas nikel telah menguasai 639.403,26 hektar lahan konsesi untuk pertambangan yang tersebar di 3 provinsi di Pulau Sulawesi (Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara)².

Berbagai dampak buruk yang telah dialami masyarakat Sulawesi di sekitar industri pertambangan nikel adalah “Alarm” kepada Pemerintah Indonesia, bahwa memperluas

¹ Nikel (Ni) adalah logam keras yang di dalam kehidupan sehari-hari merupakan material untuk membuat kabel, listrik, koin, dan peralatan militer. Bentuknya berupa logam keras dan padat, berwarna keperakan dengan semburat keemasan, yang memiliki ketahanan terhadap panas dan korosi. Sementara Limonit atau bijih nikel berkadar rendah adalah bijih besi yang mengandung campuran besi oksida-hidroksida.

² Olah Data IUP Geoportal Kementerian ESDM, 2021

tambang nikel dan meningkatkan produksi nikel hanya akan membawa rakyat pada kemiskinan hebat dan penderitaan yang panjang atau dengan kata lain akan berujung kepada bencana sosial-ekologis yang sangat luas dan besar, terutama di Pulau Sulawesi.



Gambar 1 Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Pulau Sulawesi

Sejarah Eksploitasi Nikel di Sulawesi

Eksplorasi pertambangan mineral nikel di Indonesia telah dimulai pada awal abad ke 20, tepatnya pada tahun 1901 yang dimulai dengan eksplorasi seorang peneliti berkebangsaan Belanda bernama Kruyt yang melakukan penelitian di pegunungan verbeek, Sulawesi

Selatan. pada tahun 1909 EC Abendanon seorang ahli geologi berkebangsaan belanda juga menemukan bijih nikel di kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Sejak penemuan awal ini Eksplorasi nikel terus dilakukan di wilayah pegunungan verbeek hingga ke Sulawesi tenggara. pada tahun 1934 Oost Borneo Maatschappij (OBM) dan Bone Tole Maatschappij melanjutkan eksplorasi pertambangan bijih nikel hingga pada tahun 1938 OBM melakukan pengiriman pertama 150.000 Ton bijih nikel menggunakan kapal laut ke jepang.

pada masa awal kemerdekaan eksplorasi nikel di wilayah Sulawesi tidak pernah terekspos hingga pada tahun 1968 diterbitkan Kontrak Karya (KK) untuk pertambangan nikel laterit kepada PT. International Nickel Indonesia (INCO), hal ini menandai titik mula eksploitasi nikel skala besar di Indonesia. Hingga saat ini telah ada setidaknya 54 perusahaan penambang nikel di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI).

Di Sulawesi selatan sendiri hingga akhir 2021 telah terdapat 6 perusahaan tambang nikel yang menguasai 87.556,4 Hektar wilayah konsesi, dan 3 Blok pertambangan yang terdiri dari Blok Pongkeru, Blok Bulubalang, dan Blok Lingke Utara dengan total luasan 6.860,51 Hektar. Sementara di Sulawesi Tengah, ada 37 perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha pertambangan nikel dengan total luas mencapai 92.604 Hektar.

Kemudian izin usaha pertambangan nikel yang paling banyak dan luas di Pulau Sulawesi berada di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan catatan WALHI Sulawesi Tenggara, hingga akhir tahun 2021, terdapat 252 perusahaan tambang yang telah mendapat izin usaha pertambangan nikel dengan total luas mencapai 510.282 Hektar. Dengan Demikian, berdasarkan data WALHI Sulawesi Selatan, WALHI Sulawesi Tengah dan WALHI Sulawesi Tenggara, jumlah IUP nikel yang telah dikeluarkan pemerintah hingga akhir tahun 2021 mencapai 295 IUP dengan total luas mencapai 690.442 Hektar.

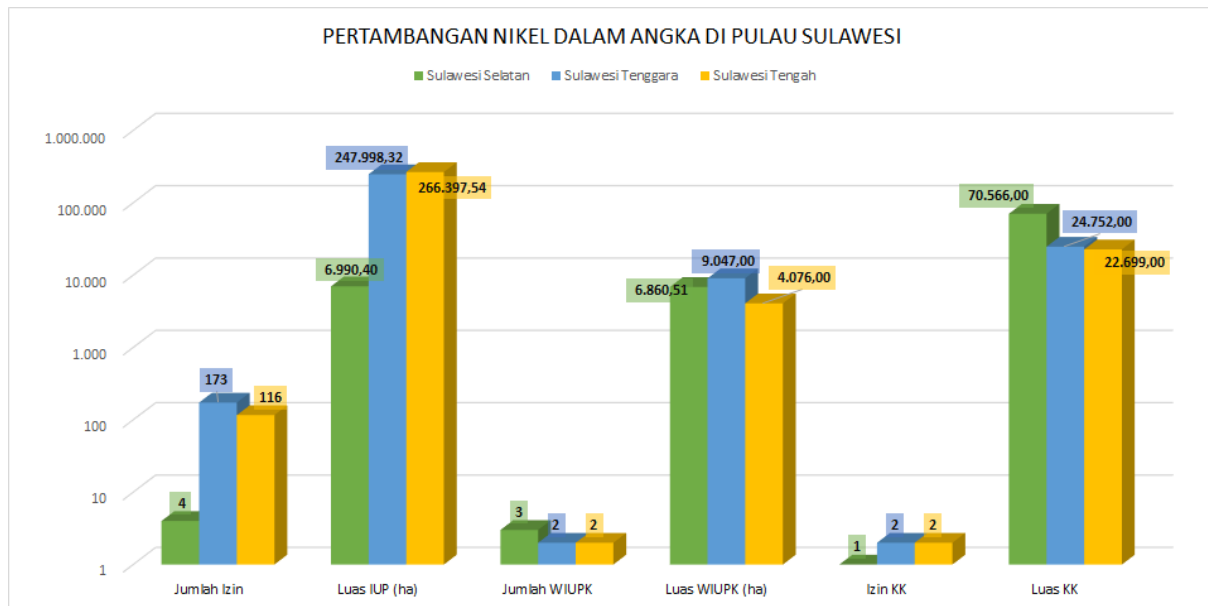
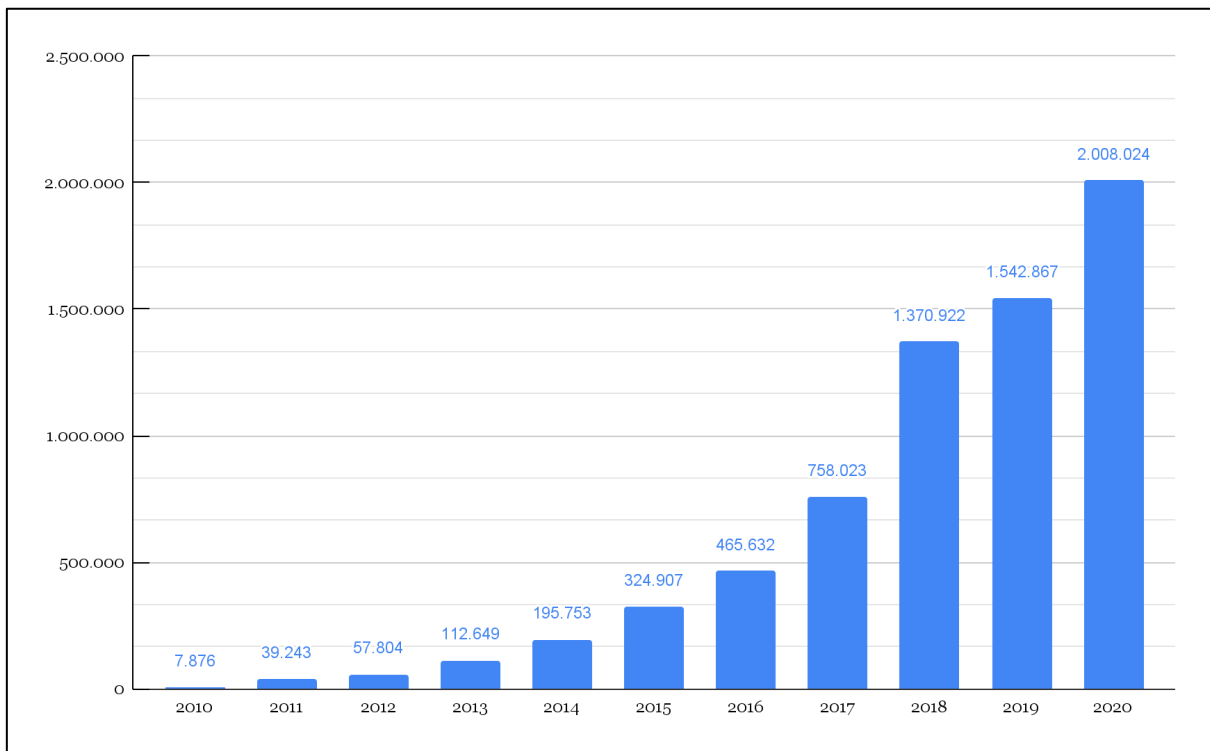


Diagram: Pertambangan Nikel Dalam Angka Di Pulau Sulawesi
(Sumber: Kementerian ESDM 2021)

Tren Kendaraan Listrik Global

Sejak krisis energi pada tahun 1979 yang mengakibatkan harga minyak naik drastis membuat dunia mulai mencari energi alternatif pengganti minyak bumi, berbagai penelitian dilakukan sejak saat itu untuk menemukan energi alternatif yang lebih hemat dan murah, selain itu luasnya tekanan akan isu perubahan iklim dan pelestarian lingkungan di seluruh dunia mendorong berbagai pihak untuk beralih meninggalkan energi fosil ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. salah satu sektor yang terus mendorong perubahan ini adalah sektor transportasi.

Transisi energi fosil ke energi terbarukan khususnya energi listrik mendorong pertumbuhan produksi kendaraan listrik di seluruh dunia. Berdasarkan data dari international Energy Agency (IEA) Tahun 2020, setidaknya telah ada 2.008.004 kendaraan listrik berbasis baterai telah dipasarkan ke seluruh dunia, dengan pasar terbesar berada di Eropa, China dan Amerika Serikat.



*Diagram 1 Pertumbuhan penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) di Seluruh dunia
(Sumber: International Energy Agency)*

International Energy Agency (IEA) juga memprediksi penggunaan kendaraan listrik pada akhir dekade (2030) akan mencapai 14 juta unit di seluruh dunia, masifnya perkembangan industri kendaraan listrik berbasis baterai tersebut tidak seutuhnya memberikan dampak positif bagi lingkungan dan menekan laju krisis iklim yang dampaknya telah kita rasakan saat ini.

Seiring dengan laju perkembangan industri kendaraan listrik, kebutuhan akan baterai sebagai salah satu komponen utama dari kendaraan listrik tersebut akan turut meningkat dengan drastis. Kondisi ini mendorong laju ekspansi pertambangan nikel yang digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan baterai jenis Lithium-ion yang banyak digunakan saat ini.

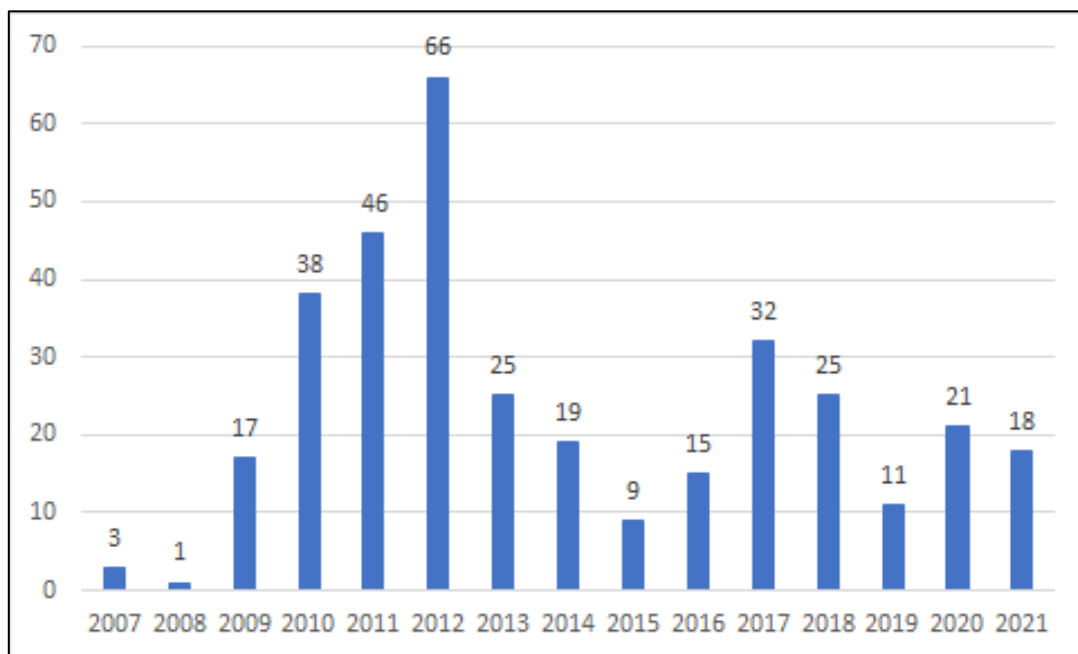
Sementara itu tren pengembangan mobil listrik mulai terlihat sejak tahun 2012 ketika Dahlan Iskan, Menteri BUMN pada saat itu mendorong program mobil nasional berpengerak listrik. namun jauh sebelum itu, penelitian terhadap kendaraan listrik telah dilakukan LIPI sejak tahun 1997. Perkembangan industri kendaraan listrik sejak saat itu berjalan cenderung stagnan, dikarenakan masalah infrastruktur kendaraan, hingga sparepart yang tidak ikut berkembang. Disisi lain penelitian terkait pembuatan kendaraan listrik terus dilakukan di berbagai kampus dan lembaga penelitian di Indonesia.

Ambisi Pemerintah Sebagai Produsen Nikel Terbesar Dunia Sumber Masalah di Pulau Sulawesi

Tingginya jumlah transisi kendaraan yang menggunakan energi fosil ke energi terbarukan di seluruh dunia beberapa tahun terakhir membuat pemerintah Indonesia ingin ikut mengambil bagian dari proses tersebut. Pemerintah Indonesia menyadari betul potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia dapat digunakan secara maksimal dalam pengembangan industri mobil listrik berbasis baterai, hal ini tidak lepas dari besarnya cadangan sumber daya nikel yang ada di Indonesia.

Secara umum di tahun 2019, permintaan nikel global didominasi oleh industri stainless-steel, sementara kebutuhan baterai hanya sebesar 5-8%. namun kebutuhan nikel untuk baterai diprediksi terus meningkat seiring dengan semakin masifnya penggunaan kendaraan listrik.

Ambisi pemerintah Indonesia untuk menjadi produsen nikel terbesar di dunia terlihat sejak pengesahan undang-undang no.4 Tahun 2009 tentang Minerba. Implikasi dari aturan tersebut mendorong diterbitkannya ratusan izin usaha pertambangan nikel di seluruh Indonesia, hingga saat ini (2021) telah diterbitkan 292 izin usaha pertambangan dan 4 Kontrak Karya pertambangan nikel di seluruh Indonesia³.



*Diagram 2 Jumlah IUP yang diterbitkan Pemerintah Indonesia per tahun
(Sumber: Geoportal ESDM 2021)*

Dalam mendorong hilirisasi ekosistem industri nikel, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas produksi nikel dalam negeri, pembangunan smelter dan kawasan industri pertambangan terus lahir dalam upaya meningkatkan nilai dari komoditas nikel di

³ Booklet Peluang Investasi Nikel Indonesia, Kementerian ESDM

Indonesia. Hingga tahun 2021, telah dibangun 25 Smelter untuk pemurnian bijih nikel, Sebanyak 41 perusahaan sedang melakukan konstruksi dan 31 perusahaan masih mengajukan perizinan. pembangunan smelter pengolahan nikel di Indonesia berjalan dengan sangat cepat, mengingat pemerintah hanya menetapkan target pembangunan sebanyak 30 smelter pengolahan nikel pada tahun 2024⁴.

Berdasarkan paparan Kepala Sub Direktorat Industri Logam Bukan Besi, Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian, Sri Bimo Pratomo, dalam webinar masa depan hilirisasi nikel, kementerian ESDM, mengungkapkan saat ini telah ada 19 perusahaan smelter yang mengolah bijih nikel menjadi berbagai produk setengah jadi, yang tersebar di beberapa wilayah dengan total kapasitas produksi mencapai 12,437,000 Ton / Tahun, 14 diantaranya terdapat di pulau Sulawesi, dengan kabupaten morowali menjadi wilayah yang memiliki smelter terbesar (9 Smelter).

Tekad Pemerintah Indonesia dalam mendorong pengembangan industri nikel kemudian semakin masif dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Tiongkok untuk mendirikan kawasan industri berbasis nikel di Morowali bernama *Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)*. Di Kawasan ini hilirisasi nikel dilakukan untuk menghasilkan berbagai jenis produk nikel diantaranya feronikel, nickel pig iron, dan stainless steel.

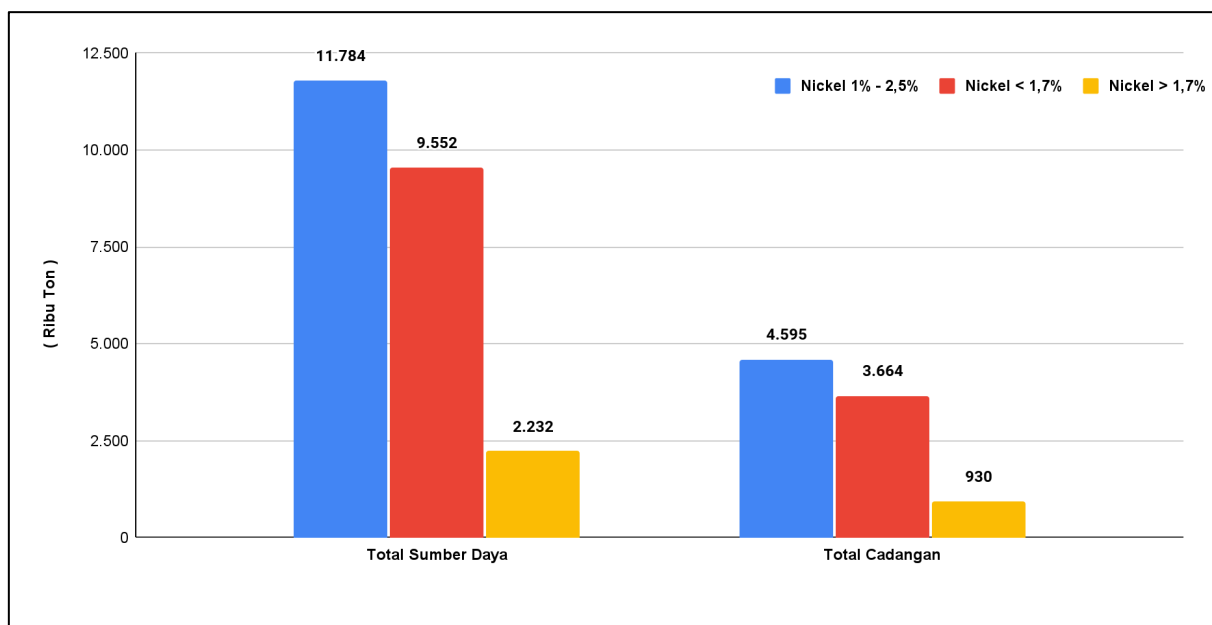
Sementara itu, Pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 memasukan pembangunan kawasan industri terpadu untuk mengerjakan proses smelting mineral dan memproduksi komponen baterai berbasis nikel untuk kendaraan listrik di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. kawasan industri ini kemudian diberi nama *Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP)*, proses pembangunan kawasan industri ini telah memulai tahap konstruksi sejak tahun 2018. Pembangunan kawasan Industri untuk pengolahan Nikel dilakukan di seluruh jalur distribusi nikel, selain di Morowali dan Weda, Maluku Tengah, kawasan industri juga dibangun di kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dan Konawe, Sulawesi Tenggara.

Hilirisasi Komoditas nikel di Indonesia selanjutnya didukung oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 dengan larangan ekspor nikel kadar rendah dengan pertimbangan untuk pertambahan nilai dari komoditas nikel melalui proses pengolahan dalam negeri untuk mendukung masifnya pembangunan smelter beberapa tahun terakhir. Di tahun yang sama presiden Jokowi juga menandatangani Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan, dengan hadirnya peraturan ini semakin memperlihatkan

⁴ Data Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI)

ambisi besar pemerintah Indonesia dalam membangun ekosistem komoditas nikel dari hulu hingga hilir.

Disisi lain kampanye terhadap transisi energi fosil ke energi terbarukan melalui pengembangan industri baterai untuk mendukung ekosistem mobil listrik dan peralihan dari kendaraan industri mobil berbahan bakar fosil ke energi listrik tidak terlihat signifikan, perkembangan ekspansi pertambangan nikel yang ada di Indonesia. kebutuhan nikel kelas 1 (Ni 99.9%) untuk produksi baterai jenis lithium-ion hingga saat ini tidak ditemukan di Indonesia, sebagian besar dikarenakan kualitas bijih nikel yang ditemukan di Indonesia berkadar di bawah 1.7% Ni, dan dibutuhkan teknologi pengolahan hidrometalurgi untuk menghasilkan kualitas nikel yang lebih baik, berbeda dengan pengolahan bijih nikel yang selama ini digunakan di Indonesia dengan teknik pengolahan pirometalurgi untuk menghasilkan nikel kelas 2 seperti Nickel Pig Iron, Feronikel, dan Nickel Matte yang sebagian besar digunakan dalam industri stainless steel.



*Diagram 3 Klasifikasi sumber Daya dan cadangan Nikel di Indonesia
(Sumber: Presentase Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM dalam Webinar Masa Depan Hilirisasi Nikel Indonesia - 2020)*

Dengan kualitas nikel kadar rendah yang ada di Indonesia, dibutuhkan smelter dengan teknologi hidrometalurgi atau yang biasa dikenal dengan High Pressure Acid Leach (HPAL) agar dapat mengolah nikel kadar rendah. namin dalam perencanaan pembangunan puluhan smelter yang ada di Indonesia, hanya ada 5 perusahaan yang akan membangun smelter dengan teknologi HPAL tersebut, 3 diantaranya berada dalam tahap konstruksi, dan 2 masih dalam tahap studi kelayakan, perusahaan yang akan membangun smelter dengan teknologi

HPAL tersebut adalah; (1)Huayue Nickel Cobalt, (2) QMB New Energy Material, (3) Smelter Nikel Indonesia, (4) Weda Bay Nickel, (5) Halmahera Persada Lygend.

Selain membutuhkan teknologi pengolahan bijih nikel dengan menggunakan teknik hidrometalurgi untuk melakukan pemurnian nikel menjadi kelas 1 (Ni 99.9%), dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik jenis lithium-ion, maka bahan baku utama dalam pembuatan baterai tersebut Litium (Li) jauh lebih banyak dibutuhkan daripada nikel itu sendiri. jika ambisi pemerintah dalam menguasai pasar dunia melalui industri baterai kendaraan listrik semakin besar, pencarian akan bahan baku litium baik melalui eksplorasi maupun ekspor dari negara-negara yang memiliki cadangan Litium akan dilakukan secara besar-besaran untuk mengimbangi produksi nikel murni yang akan dihasilkan.

Tabel.1 Perencanaan Pembangunan Smelter Nikel di Sulawesi

N o	Nama Perusahaan	Produk	Perkiraan Kapasitas Produksi (Ton/thn)	Lokasi
1	PT QMB New Energy Material	Ni Murni	50.000	Morowali
		Co Murni	4.000	
2	PT Huayue Nickel Cobalt	Ni Murni	60.000	Morowali
		Co Murni	7.800	
3	PT Obsidian Stainless Steel	Stainless Steel	3.000.000	Konawe
4	PT Bukit Smelter Indonesia	NPI	150.000	Morowali
5	PT Titan Mineral Utama	NPI	53.000	Bantaeng
6	PT MBG Nikel Indonesia	NPI	160.000	Koinawe
7	PT Lestari Smelter Indonesia	NPI	300.000	Morowali
8	PT Fajar Metal Industry	Nickel Sulfida	60.000	Morowali
9	PT Teluk Metal Industry	Nickel Sulfida	60.000	Morowali
10	PT Walsin Nickel Industrial Indonesia	Nickel Pig Iron	300.000	Morowali
11	PT Indonesia Puqing Recycling Technology	Nickel Cobalt manganese hydroxide	12.000	Morowali

		Coarse lithium carbonate	1.200	
12	PT. Sungai Raya Nickel Alloy Indonesia	FeNi	160.000	Konawe Selatan
Total Kapasitas			4.378.000	Pulau Sulawesi

Dampak Aktivitas Pertambangan Nikel di Sulawesi: Deforestasi, Kerusakan Lingkungan, Kejahatan HAM dan Marjinalisasi Perempuan.

Secara singkat telah dijelaskan bagaimana ambisi pemerintah untuk menjadi produsen nikel terbesar di dunia, dengan memanfaatkan isu transisi energi ke energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, pemerintah Indonesia mendorong ekspansi industri pertambangan nikel yang masif dimulai sejak disahkannya undang-undang no.4 tahun 2009 tentang Minerba.

Di Pulau Sulawesi saat ini telah terbit 293 Izin Usaha Pertambangan untuk komoditas nikel yang terbagi di 3 provinsi (Sulawesi Selatan, Tengah, dan Tenggara). Keseluruhan konsesi pertambangan dengan komoditas nikel tersebut menguasai 639.403,26 hektar lahan atau sama dengan 66.9% dari total luas tutupan hutan hasil klasifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)⁵ yang berada di 3 provinsi tersebut.

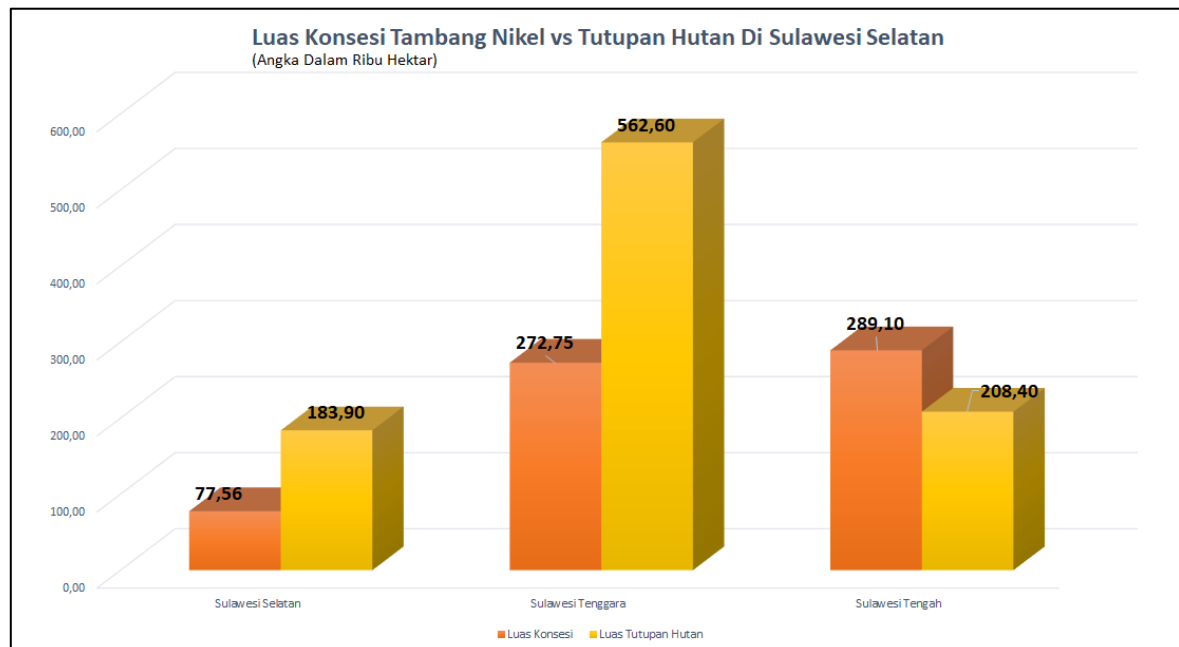


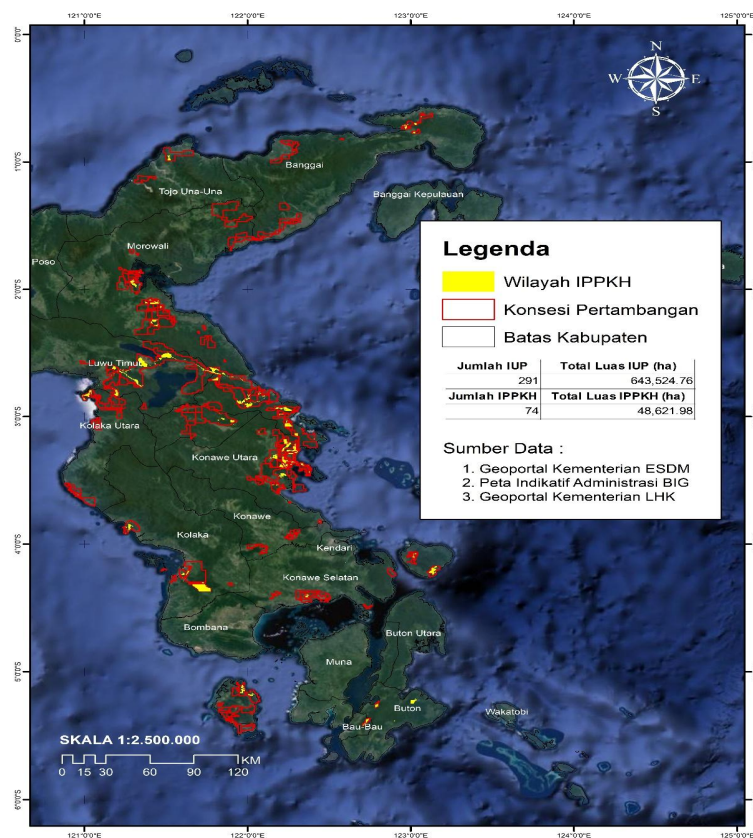
Diagram 4 Perbandingan Luasan Konsesi Pertambangan Nikel dan Luas Tutupan Hutan Tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan, Tengah dan Tenggara

Masifnya pemberian izin bagi perusahaan tambang khususnya pertambangan nikel di Pulau Sulawesi, menimbulkan berbagai dampak ekologis yang besar, dimulai dari kerusakan hutan

⁵ Data Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2020 – KLHK (2021)

atau deforestasi, hingga pencemaran di pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. kebutuhan akan lahan yang luas dari industri pertambangan nikel ini pun dipermudah oleh pemerintah Indonesia dengan memberikan izin pinjam pakai kawasan hutan, baik di kawasan hutan produksi hingga kawasan hutan lindung yang selama ini terus dijaga kelestariannya oleh masyarakat adat dan lokal. Di Pulau Sulawesi, berdasarkan kajian ruang yang dilakukan oleh WALHI Region Sulawesi, terdapat 74 IPPKH yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 48.621,98 Hektar. Sementara di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan telah diterbitkan 3 izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) kepada 3 perusahaan tambang nikel oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan RI seluas 9.711,77ha.

Kebutuhan akan lahan yang luas dari industri pertambangan khususnya nikel di Sulawesi harus mengorbankan hutan yang sangat luas. Tentu hal tersebut sama dengan pemerintah mengorbankan fungsi ekosistem hutan yang sangat besar dan esensial bagi masyarakat, hanya untuk mempermudah pemilik modal atau perusahaan tambang mengeksploitasi nikel di Sulawesi dan meraup keuntungan yang fantastis.



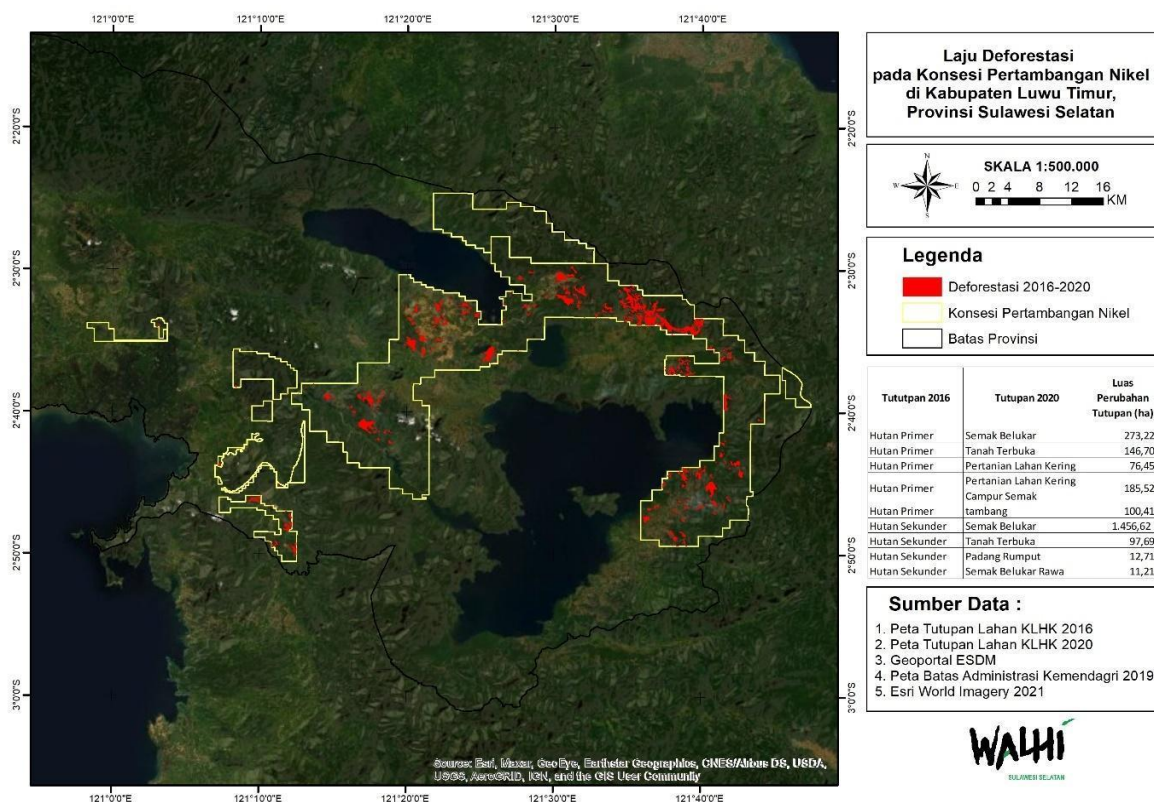
Gambar 2 Peta Overlay Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Konsesi Pertambangan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Aktivitas industri pertambangan nikel seperti halnya dengan aktivitas industri ekstraktif lainnya yang rakus lahan dan berkontribusi menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Aktivitas pertambangan nikel di Luwu Timur, Sulawesi selatan dalam 1 dekade terakhir mendorong deforestasi yang sangat luas pada wilayah-wilayah yang masuk dalam zona lingkaran tambang.

Dalam rentan waktu 2016 hingga 2020 perubahan tutupan hutan lahan kering primer pada wilayah konsesi pertambangan di Luwu timur telah berkurang sebesar 782,30 hektar. Perusakan kawasan hutan tidak berhenti sebatas penurunan tutupan hutan primer. Aktivitas industri pertambangan nikel yang rakus lahan ini juga terus menggerus kawasan hutan lindung yang dijaga dengan ketat oleh masyarakat adat dan lokal, serta UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Namun, yang terjadi deforestasi akibat penambangan nikel kian meluas dari tahun ke tahun.

Pada Tahun 2020, 4 orang pimpinan PT. Vale Indonesia, mewakili nama perusahaan diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 47 PK/Pid.Sus/2020 atas perambahan kawasan hutan lindung, dan diganjar dengan hukuman hanya 2 tahun penjara dengan denda 5 miliar rupiah. Putusan MA tersebut melalui proses yang begitu panjang sejak sidang pertama pada tahun 2011. Kondisi tersebut menunjukkan betapa sulitnya negara mengadili pelaku kejahatan lingkungan walau disertai dengan bukti-bukti yang sangat jelas.



Gambar 3 Deforestasi pada wilayah konsesi pertambangan nikel di Kab. Luwu Timur 2016 - 2020

Melihat perubahan tutupan hutan didominasi oleh pertanian lahan kering di wilayah konsesi menunjukkan kegagalan negara dalam mengelola kawasan hutan, penetapan kawasan hutan sangat jelas berbeda dengan kondisi tutupan hutan di lapangan. hal ini memicu perambahan wilayah-wilayah dengan fungsi hutan di luar kawasan menjadi semakin masif. Data tersebut juga menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan pertambangan tidak mampu menjaga kawasan konsesinya dari laju deforestasi akibat dari penentuan kawasan konsesi sejak awal menimpa wilayah-wilayah masyarakat adat / komunitas lokal di sekitar kawasan hutan.

Potret Perubahan Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Sulawesi Akibat Pertambangan Nikel

Deforestasi Hingga Pencemaran Laut di Sulawesi Selatan

Berdasarkan pantauan dan catatan WALHI Sulawesi Selatan yang dilakukan per September 2021, saat ini, dari enam perusahaan tambang nikel di Sulawesi Selatan, ada tiga perusahaan yang sedang menambang nikel di bentang alam hutan Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pertama PT Vale Indonesia Tbk, di Blok Sorowako. Kemudian PT Prima Utama Lestari, dan yang ketiga, PT Citra Lampia Mandiri, di Blok Landau. Luas konsesi tambang ketiga perusahaan ini mencapai 74.253,4 Ha. Dengan demikian 74.253,4 Ha hutan Sulawesi Selatan yang dulunya berfungsi sebagai habitat flora dan fauna, sumber kehidupan masyarakat adat dan local serta daerah tangkapan air telah berubah fungsi menjadi area pertambangan nikel.



*Gambar 4 Potret deforestasi di Luwu Timur yang disebabkan aktivitas tambang nikel
(Sumber: Dok.WALHI Sulsel)*

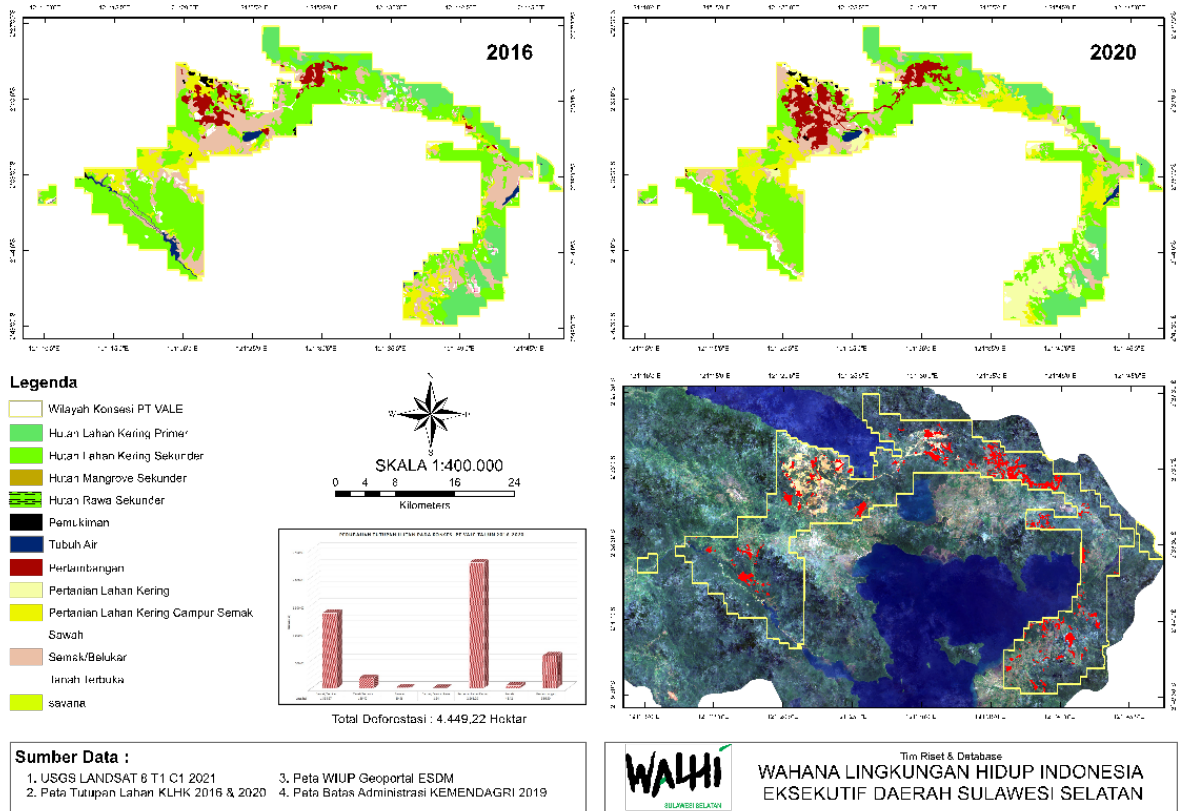
Kemudian, berdasarkan pantauan dan kajian ruang yang dilakukan WALHI Sulsel atas dukungan organisasi selamatkan hutan hujan, luas deforestasi akibat pertambangan nikel di Sulawesi Selatan telah mencapai 4.752,87 Ha. Kerusakan hutan ini tentu saja akan terus meningkat sejalan dengan semakin masifnya aktivitas tambang nikel di Pegunungan Verbeek, Sulawesi Selatan.

Sebagai contoh di area konsesi tambang PT Vale Indonesia Tbk. Berdasarkan hasil kajian dan investigasi lapangan yang kami lakukan pada Agustus 2021, dari 70.566 Ha konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintah, telah terjadi deforestasi seluas 4.449,22 Ha. Kerusakan hutan tersebut ternyata telah memberi dampak yang sangat buruk bagi kelestarian danau purba yang berada dekat di sekitar konsesi PT Vale Indonesia.



*Gambar 5 Wilayah Lingkar Tambang PT.VALE yang begitu dekat dengan pemukiman warga
(Sumber: Dok. WALHI Sulsel)*

Peta Perubahan Tutupan Lahan Pada Konsesi Tambang PT VALE Indonesia Tahun 2016 - 2020



Gambar 6 Peta Perubahan Tutupan Lahan Pada Konsesi Tambang PT.VALE

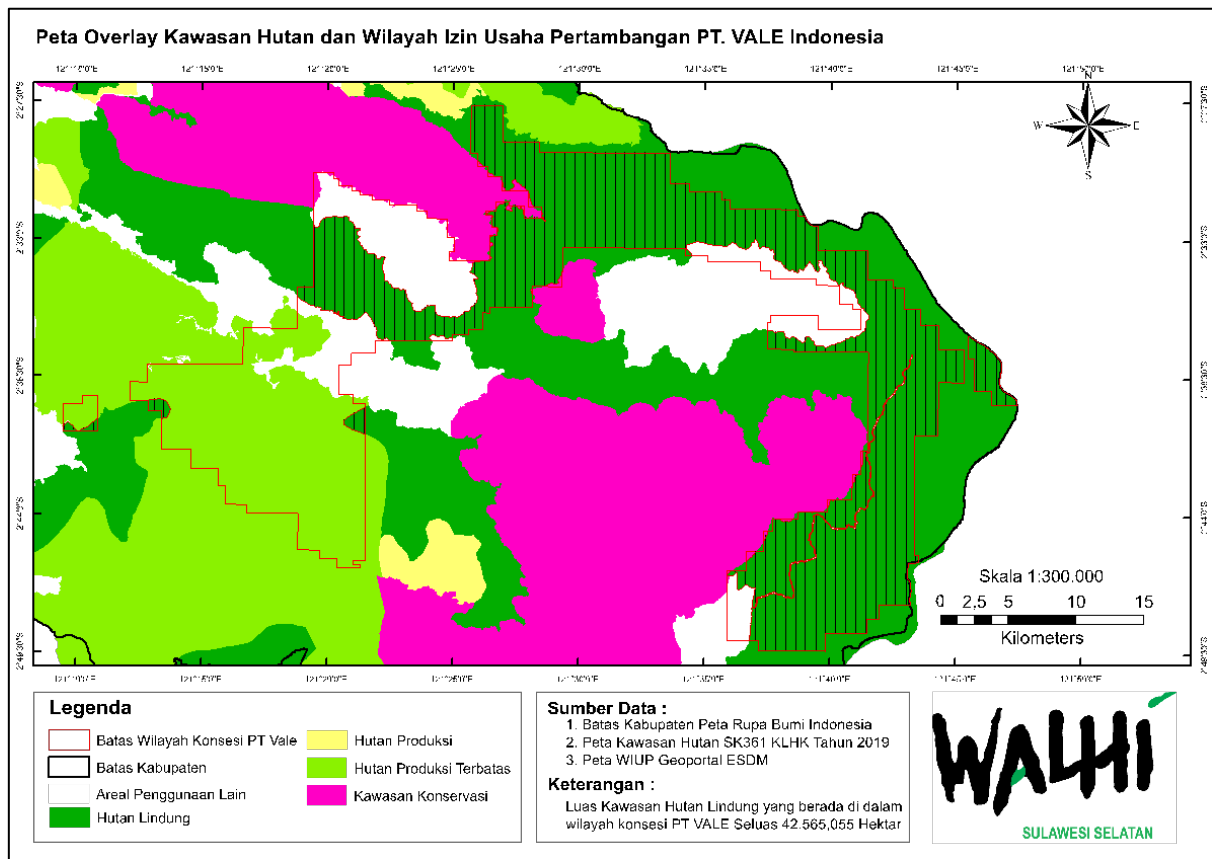
Danau Mahalona, salah satu danau purba di Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang berada di antara konsesi tambang PT Vale Indonesia saat ini sedang mengalami pendangkalan. Berdasarkan keterangan masyarakat Desa Tole, pendangkalan di Danau Mahalona terjadi akibat sedimentasi bekas tambang PT Vale Indonesia. Masyarakat melihat secara jelas bagaimana proses masuknya sedimentasi bekas tambang PT Vale masuk ke Danau Mahalona. Masuknya sedimentasi bekas tambang sering terjadi saat hujan lebat dan terutama saat PT Vale membuka pintu bendungan “pete’a”.

Dan sampai saat ini, pendangkalan akibat sedimentasi di Danau Mahalona terus mengalami peningkatan. Berangkat dari kondisi tersebut, masyarakat berharap agar Izin Usaha Pertambangan PT Vale Indonesia ditinjau Kembali. Masyarakat meminta agar konsesi PT Vale Indonesia dikurangi, terutama konsesi yang berada di area yang beririsan langsung dengan tiga danau purba Sulawesi Selatan (Danau Matano, Danau Mahalona dan Danau Towuti).



*Gambar 7 Sedimentasi bekas tambang PT Vale Indonesia yang masuk dan mendangkali Danau Mahalona.
(Sumber: Dok. WALHI Sulsel)*

Tidak hanya deforestasi, dari pantauan dan analisa WALHI Sulsel terhadap peta konsesi PT Vale Indonesia yang kami overlay dengan peta kawasan hutan Sulawesi Selatan, ditemukan bahwa setengah bahkan lebih dari setengah konsesi PT Vale Indonesia masuk dalam kawasan hutan lindung. Luasnya mencapai 42.585,055 Ha. Dengan demikian, hutan di pegunungan verbeek yang hakikatnya memiliki fungsi ekologi yang sangat tinggi serta fungsi lindung yang sangat esensial telah dikorbankan oleh pemerintah untuk mempermudah bisnis nikel yang dijalankan PT Vale Indonesia. Maka berdasarkan data dan kajian tersebut, terlihat bahwa dampak dan resiko kerusakan lingkungan di area konsesi tambang PT Vale Indonesia akan sangat besar. Dan akan banyak masyarakat yang terdampak resiko kerusakan hutan tersebut. Hal inilah yang melandasi masyarakat menentang keberadaan aktivitas tambang PT Vale Indonesia di kawasan hutan lindung, terutama perempuan yang hidup dan menggantungkan hidup dari hutan. Karena keuntungan yang diperoleh PT Vale Indonesia dari bisnis nikel mereka jauh lebih besar dari pajak yang diterima pemerintah. Akan tetapi, pemerintah dan masyarakat yang akan paling besar menanggung kerusakan dan pemulihan lingkungan di masa depan.



Gambar 8 Peta Overlay Kawasan Hutan dan Wilayah Konsesi Pertambangan PT.VALE

Kemudian dampak yang lain dari aktivitas tambang nikel di Sulawesi Selatan adalah pencemaran sungai dan laut. Kita tahu bahwa air sungai bersumber dari mata air di hulu dan mengalir ke hilir. Maka bila terjadi perubahan lingkungan atau kerusakan lingkungan (hutan) di hulu, maka sungai akan tercemar dan pencemaran di sungai akan bermuara sampai ke laut.



Gambar: Pencemaran yang terjadi di Sungai Malili akibat lumpur tambang PT Citra Lampia Mandiri. (Sumber: Dokumentasi WALHI Sulsel)

Potret pencemaran sungai dan laut tersebut terjadi di area tambang milik PT Citra Lampia Mandiri. Penebangan hutan dan penambangan nikel telah membuat Sungai Laoili, Pongkeru hingga Sungai Malili tercemar. Warnanya berubah menjadi coklat pekat, dan berlumpur. Menurut keterangan warga Desa Lampia dan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai, pencemaran sungai tersebut mulai terjadi saat PT Citra Lampia Mandiri mulai beroperasi menambang nikel di hutan. Masyarakat pun tidak pernah diberi tahu terkait sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dijalankan oleh PT CLM (Citra Lampia Mandiri). Selain itu, perusahaan tidak pernah melakukan konsultasi publik sebelum melakukan penambangan atau sebelum menambang nikel. Walaupun begitu, masyarakat sangat yakin bahwa pencemaran yang terjadi mulai dari sungai Laoili hingga Sungai Malili disebabkan oleh aktivitas tambang nikel dari konsesi milik PT CLM.



Gambar: Salah satu sungai di Luwu Timur tercemar lumpur dari lokasi tambang nikel PT Citra Lampia Mandiri. (Sumber: Dokumentasi WALHI Sulsel)

Pada tahun 2019, warga Desa Lampia pernah melakukan aksi protes terkait pencemaran sungai Laoli. Mereka menuntut perusahaan untuk menghentikan aktivitas tambang nikel di hutan karena berdampak pada pencemaran sungai yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat. Dampak pencemaran sungai ini, masyarakat tidak dapat lagi memanfaatkan air sungai, baik untuk dikonsumsi, maupun untuk keperluan lain seperti untuk mandi, dan mencuci bagi perempuan.

Selain itu, salah satu alasan masyarakat meminta perusahaan bertanggung jawab atas pencemaran sungai karena sebelum pertambangan nikel PT Citra Lampia Mandiri ini beroperasi, masyarakat sering memancing ikan di sungai, baik untuk makan sehari-hari maupun untuk dijual ke pasar. Namun setelah tambang beroperasi, sungai Laoili hingga Sungai Malili tercemar, lumpur masuk ke sungai, masyarakat tidak lagi dapat mencari ikan di sungai. Dengan demikian, sudah sangat nyata bahwa kerusakan hutan akibat tambang nikel PT Citra Lampia Mandiri telah berdampak buruk bagi ekosistem sungai sehingga membuat ekonomi masyarakat di sekitarnya ikut terganggu.

Terakhir, pencemaran laut sebagai dampak tambang nikel di Sulawesi Selatan. Setelah mendapat dukungan dari organisasi selamatkan hutan hujan, WALHI Sulsel akhirnya mampu melakukan kunjungan ke beberapa desa-desa pesisir untuk melihat dampak tambang nikel terhadap ekosistem pesisir dan laut. Dalam investigasi WALHI Sulsel, kami menemukan bahwa dampak tambang nikel di Sulsel tidak hanya mendangkali danau dan mencemari sungai, namun juga mencemari laut.



*Gambar 9 Potret pencemaran Laut Lampia, Luwu Timur akibat dampak tambang PT Citra Lampia Mandiri
(Sumber: Dok.WALHI Sulsel)*

Pencemaran laut akibat dampak tambang nikel terjadi di pesisir-laut Lampia, desa Lampia, Kabupaten Luwu Timur. Pencemaran laut Lampia ini terjadi di area konsesi tambang PT Citra Lampia Mandiri. Menurut informasi nelayan, pencemaran lumpur di laut Lampia bersumber dari aktivitas tambang PT Citra Lampia Mandiri yang masuk melalui sungai. Selain itu, lumpur bekas tambang juga bersumber dari tumpahan material tambang di kapal pengangkut material nikel.

Nelayan mengatakan bahwa sebelum PT CLM beraktivitas dan menambang nikel di Blok Landau, Laut Lampia sangat bersih, potensi ikannya juga sangat melimpah. Bahkan di laut lampia, ikan jenis ikan baronang sangat sering ditangkap nelayan.

Lalu, pada saat PT Citra Lampia Mandiri mulai beroperasi, air laut tiba-tiba berubah warna menjadi merah, terutama saat hujan turun. Awalnya, air sungai berubah warna menjadi merah lalu masuk ke laut, sehingga air laut pun keruh dan berubah menjadi merah. Kejadian ini terus terjadi hampir setiap hari. Bahkan menurut masyarakat, pada saat musim hujan, nelayan tidak pernah menemukan air laut bersih seperti dulu. Lalu, saat musim kemarau, lumpur-lumpur yang masuk ke laut mengendap di dasar laut, sehingga pesisir Lampia mengalami pendangkalan.



*Gambar 10 Limbah sedimen bekas tambang yang mengendap di dasar laut lampia
(Sumber: Dok.WALHI Sulsel)*

Pencemaran laut akibat masuknya lumpur tambang ke laut juga berdampak bagi rusaknya habitat biota laut. Berdasarkan pengamatan tim investigasi WALHI Sulsel dan penjelasan nelayan Desa Lampia, pencemaran laut yang terjadi akibat masuknya lumpur tambang nikel ke laut telah menurunkan kualitas hidup ekosistem mangrove di Pesisir Lampia. Dengan begitu, habitat kepiting dan ikan baronang juga ikut rusak. Buktinya nelayan saat ini sangat sulit mendapatkan ikan baronang dan kepiting di pesisir Lampia.

Kemudian, endapan lumpur tambang di Laut Lampa juga telah merusak pertumbuhan terumbu karang dan biota laut lainnya seperti sponsia dan rumput laut. Para nelayan Lampa mengatakan bahwa banyak terumbu karang dan sponsia mati akibat pencemaran lumpur tambang nikel. Hal ini disebabkan karena jumlah lumpur yang masuk mencemari dan mengendap di dasar laut sudah sangat banyak. Masyarakat memperkirakan pencemaran di laut lampa telah terjadi sejak tahun 2019.



Gambar 11 Salah satu biota di Laut Lampa, jenis sponsia mati karena habitatnya terpapar lumpur tambang nikel. (Sumber: Dok.WALHI Sulsel)

Yang sangat penting juga adalah dampak kerusakan atau pencemaran laut bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dalam diskusi antara WALHI Sulsel dengan perempuan pesisir Lampa, di sela-sela investigasi, mengatakan bahwa pendapatan nelayan di Pesisir Lampa sangat turun tiga tahun terakhir. Pendapatan nelayan turun sejak hadirnya tambang nikel di hutan (gunung). Tahun 2020 dan 2021, penurunan hasil tangkap nelayan sangat nyata dan betul-betul dirasakan perempuan pesisir Lampa, ditambah lagi harga ikan pada saat itu turun drastis akibat pandemi. Sementara, kegiatan tambang tidak berhenti di masa pandemic.

Selain itu, para nelayan juga harus mencari ikan lebih jauh dari tiga tahun lalu, atau sebelum ada tambang nikel. Dengan demikian biaya produksi nelayan bertambah, sementara hasil

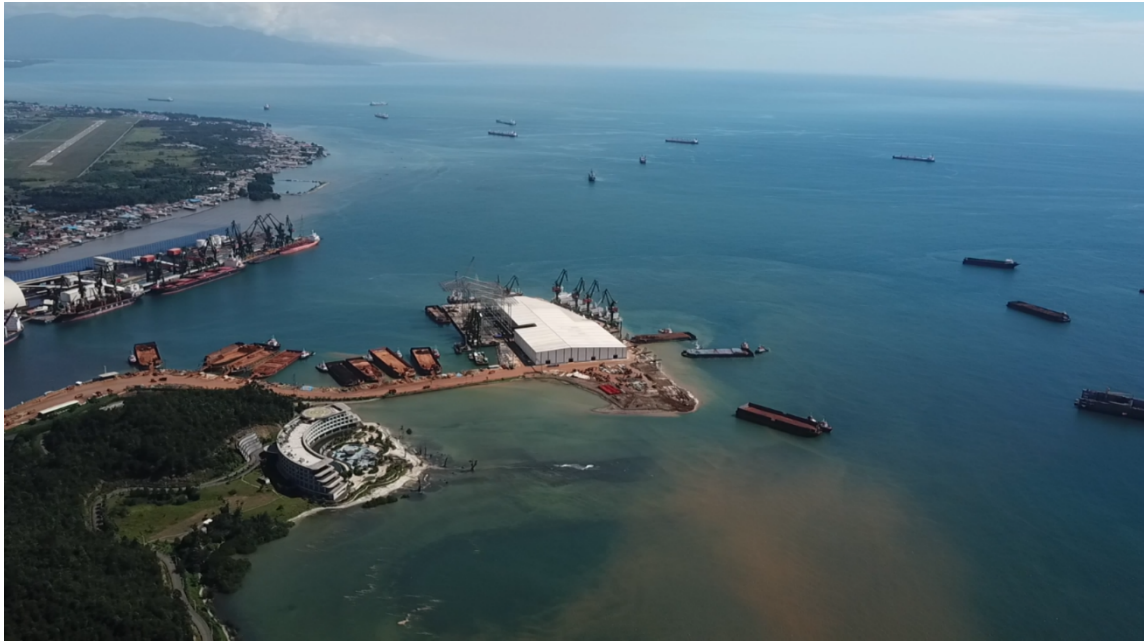
tangkapan nelayan tidak bertambah. Hal ini membuat perempuan-perempuan pesisir juga mengalami penurunan ekonomi. Kemudian, dulu, sebelum perusahaan tambang nikel datang, para perempuan-perempuan di Desa Lampia sering mencari karang, kepiting di pesisir. Namun setelah laut mereka tercemar, tidak ada lagi karang dan kepiting yang mereka bisa tangkap. Alhasil aktivitas ekonomi perempuan pesisir berhenti total.

Kini, perempuan-perempuan pesisir harus lebih berfikir keras agar dapat bertahan hidup di tengah pencemaran dan kerusakan laut akibat tambang nikel. Sudah banyak perempuan pesisir Lampia yang menjual aset mereka. Menjual perhiasan mereka agar bisa tetap membeli beras untuk makan. Selain itu, saat ini banyak perempuan pesisir Lampia yang meminjam uang agar dapat bertahan hidup bersama keluarga, sambil berharap hasil tangkap nelayan meningkat. Namun perempuan menyadari bahwa harapan itu sulit terwujud karena laut mereka sudah dan terus dicemari lumpur tambang nikel.

Sehingga mereka berharap agar pemerintah segera bertindak agar tambang nikel di gunung (hutan) dihentikan karena telah merusak laut dan memiskinkan perempuan-perempuan di sepanjang pesisir Lampia. Lanjut dari pada itu, perempuan-perempuan pesisir Lampia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menghentikan ekspansi nikel di hutan Sulawesi Selatan agar kehidupan nelayan, petani dan perempuan tidak terganggu. Dan yang paling terakhir, perempuan juga mendesak kepada PT Citra Lampia Mandiri agar bertanggung jawab secara penuh atas pencemaran laut di Lampia.

Hancurnya Ekosistem Pesisir Hingga Dampak Buruk Pertambangan Nikel Terhadap Kesehatan Masyarakat di Sulawesi Tengah.

Tahun 2012 pemerintah mengeluarkan kebijakan UU Minerba yang melarang ekspor mineral mentah sehingga pada tahun yang sama salah satu perusahaan nikel terbesar yang beroperasi di Kecamatan Bahodopi, Sulawesi Tengah yakni PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) menggagas kerjasama dengan perusahaan BUMN asal China untuk membangun sebuah pabrik industri pengolahan nikel. Dari hasil kerja sama tersebut kemudian berdiri PT. Sulawesi Mining Investment (SMI). Seiring dengan perkembangan investasi pertambangan di wilayah tersebut PT. BDM, PT. SMI dan beberapa perusahaan lain bersama pemodal asal China kemudian mendirikan kawasan Industri pengolahan nikel yang diberi nama Indonesia Morowali Industrial Park atau yang lebih dikenal dengan nama PT. IMIP. Saat ini paling tidak lebih dari 20 lebih perusahaan pengolahan nikel yang beroperasi di kawasan PT. IMIP.



Gambar 12 Foto Udara Wilayah Pesisir Bahodopi yang dijadikan Pelabuhan Bongkar Muat Batubara dan Nikel. (sumber: Dok.WALHI Sulteng)

PT. Sulawesi Mining Investment (SMI) sendiri adalah perusahaan yang didirikan dari hasil joint venture antara PT. Bintang Delapan Mineral (BDM) dan perusahaan raksasa dari China yakni Dingxin Group dengan kepemilikan saham terbesar dimiliki oleh Dingxin Group yaitu 55 % dan sisanya 45 % dimiliki oleh BDM5. Tahun 2013 infrastruktur pabrik smelter pengolahan nikel PT. SMI mulai dibangun. Setelah melewati tahap konstruksi cepat, kawasan industri Morowali sudah beroperasi sejak 2015. Kawasan industri seluas 2.0000 hektar itu sudah diisi berbagai perusahaan (tenants). Data resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Morowali menyebut jumlah tenaga kerja sudah mencapai lebih dari 38.000 pekerja. Selain smelter nikel, smelter chrome, pabrik baja dan aneka pabrik lain, kawasan itu memiliki pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan kapasitas terpasang 1.130 MW. PLTU akan terus dibangun sejalan dengan pertumbuhan industri di dalam kawasan. Saat ini, kebutuhan batubara mencapai 6 juta ton pertahun. Batubara untuk kawasan ini dikapalkan dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Infrastruktur pendukung lain sudah tersedia. IMIP memiliki pelabuhan laut, pelabuhan udara dengan panjang landasan 1.800 meter, jaringan telekomunikasi, guest house, poliklinik, pendidikan politeknik dll.

Dampak dari aktivitas industri nikel di Sulawesi tengah terangkum dalam temuan-temuan lapangan berikut :

1. Kesaksian nelayan di Kecamatan Bungku Pesisir dan Kecamatan Bahodopi membenarkan terjadinya pencemaran pada pesisir dan laut di wilayah lingkaran tambang. Sebagaimana diungkapkan nelayan desa Lafeu Hafid mengungkapkan bahwa dahulu sebelum kehadiran perusahaan tambang di sekitar Desa Lafeu dan

secara umum di wilayah Kecamatan Bungku Pesisir mereka dapat menghasilkan tangkapan yang sangat melimpah hingga berton-ton hanya dalam satu hari. Jenis ikannya pun bermacam-macam sesuai dengan musimnya. Namun setelah kehadiran perusahaan tambang di wilayah tersebut tangkapan ikan terus menurun dan sampai saat ini ikan-ikan laut di Desa Lafeu tidak lagi bisa berkembang biak seperti dulu.



Gambar 13 Pencemaran Limbah Sedimen Bekas Tambang di Desa Lafeu, Sulawesi Tengah. (Sumber Dok. WALHI Sulteng)

Menurut Hafid, kondisi tersebut disebabkan terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan laut Kecamatan Bungku Pesisir. Kerusakan lingkungan yang dimaksud adalah banyaknya endapan lumpur sisa pertambangan yang terbawa air pada musim hujan dan perubahan rona air laut yang semakin keruh dan berubah warna menjadi kecoklatan. Kondisi tersebut memaksa nelayan untuk melaut sampai ke daerah yang jauh dari Desa Lafeu. Bahkan banyak diantara mereka yang beralih profesi bekerja di perusahaan tambang.

2. Dampak negatif yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan terhadap wilayah pesisir dan laut Desa Laroenai diantaranya endapan lumpur yang berakibat pada kerusakan hutan mangrove yang sudah mencapai kedalaman 2 sampai 6 meter. Kerusakan hutan mangrove tersebut berimplikasi terhadap kehilangan salah satu sumber mata pencaharian warga Desa Laroenai yang dulunya memanfaatkan lokasi hutan mangrove tersebut sebagai tempat budidaya kepiting. Berdasarkan keterangan dari Sukardi Desa Laroenai dahulu dikenal sebagai salah satu desa penghasil kepiting dengan kualitas ekspor. Sebelum masifnya aktivitas pertambangan di Desa Laroenai dan desa-desa di Kecamatan Bungku Pesisir, kepiting yang dihasilkan dari hutan

mangrove Desa Laroenai dijual ke beberapa perusahaan ekspor perikanan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara

Dampak negatif ini diakibatkan oleh lumpur sisa pertambangan yang terbawa aliran sungai dan mengendap di wilayah pesisir yang ditumbuhi hutan mangrove yang lebat. Dampak negatif tersebut juga terlihat dari endapan lumpur di sungai yang ditumbuhi rumpun sagu yang dahulu menjadi salah satu sumber pangan lokal masyarakat Desa Laroenai. Selain itu sebagian lokasi pembangunan pabrik smelter pemurnian nikel yang dibangun di wilayah pesisir dan mencolok dan mereklamasi puluhan hektar wilayah laut Desa Laroenai.



*Gambar 14 Aktivitas Nelayan Desa Laroenai, Sulawesi Tengah
(Sumber Dok. WALHI Sulteng)*

Menurut Sukardi, sangat kuat dugaan kekeruhan air laut di wilayah pulau-pulau kecil di Kecamatan Bungku Selatan dan Menui Kepulauan, merupakan akibat aktivitas pertambangan di Kecamatan Bungku Pesisir. Jika smelter nikel tersebut telah

beroperasi akan memperparah kerusakan lingkungan dan pencemaran di wilayah laut Kecamatan Bungku Pesisir hingga ke pulau-pulau kecil di Kecamatan Bungku Selatan.

3. Desa lain yang cukup parah terdampak dari aktivitas pertambangan di Kecamatan Bungku Pesisir adalah Desa Torete. Seperti desa-desa yang lain di sekitarnya di Desa Torete juga terdapat perkampungan nelayan yang dihuni sekitar 20-an keluarga nelayan tradisional. Di desa tersebut terdapat salah satu perusahaan tambang yang beroperasi dan mengantongi IUP sejak 2007 yakni PT. Teknik Alum Service (PT. TAS). Perusahaan tersebut merupakan salah satu penyuplai ore ke kawasan PT. IMIP. Selain itu tahun 2010 sampai tahun 2012 PT. Indo Berkah Jaya Mandiri (IBJM) juga melakukan aktivitas pertambangan di desa ini, tapi sejak pelarangan ekspor mineral mentah tahun perusahaan tersebut berhenti beroperasi.

Dalam wawancara dengan Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Torete, Ashan yang berprofesi sebagai nelayan, ia mengeluhkan dampak negatif aktivitas pertambangan di Desa Torete. Ia menceritakan dahulu pada tahun 2007 sampai 2010 nelayan Desa Torete sangat mudah mendapatkan ikan, cukup di sekitar desa saja. Di dekat muara sungai saja pada saat air pasang mereka sudah bisa menangkap ikan putih dan ikan kakap merah yang cukup besar. Namun saat ini menurutnya para nelayan harus jauh melaut untuk bisa menangkap ikan.

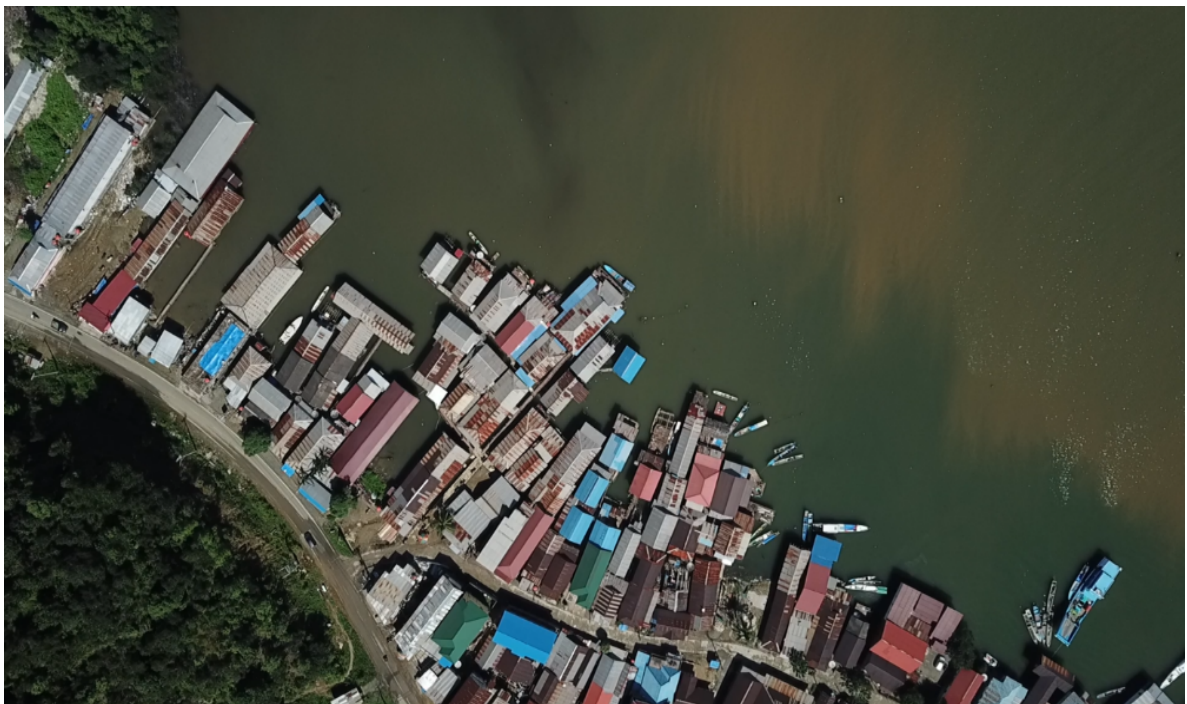
4. Desa Labota yang merupakan salah satu desa yang sangat terdampak pertambangan dan industri pengolahan nikel karena wilayah tersebut tidak jauh dari kawasan Industri PT. IMIP. Menurut keterangan warga, saat ini PT. IMIP sedang melakukan pembangunan pelabuhan bongkar muat untuk kebutuhan pabrik baterai lithium yang rencananya akan dibangun di desa tersebut. Dari keterangan salah seorang nelayan Desa Labota Yusuf (35) diperoleh informasi bahwa wilayah pesisir dan laut di Desa Labota sudah tercemar lumpur dan limbah pertambangan dan berminyak. Menurut air laut berminyak diduga karena adanya tumpahan minyak dari kapal pengangkut ore dan batu bara.

Padahal sebelum adanya aktivitas pertambangan dan pabrik pengolahan nikel di kawasan PT. IMIP laut di Desa Labota sangat jernih dan sangat menguntungkan bagi nelayan karena dengan mudah mereka mendapatkan ikan yang melimpah.



*Gambar 15 Kondisi Pesisir desa Labota, Sulawesi Tengah
(Dok. WALHI Sulteng)*

5. Wilayah pesisir dan laut yang paling terdampak dari aktifitas pertambangan dan industri pemurnian nikel adalah Desa Fatufia. Di desa tersebut beroperasi perusahaan tambang nikel PT. BDM dan merupakan pemasok utama bahan baku ore untuk pabrik smelter pengolahan nikel di kawasan industri PT. IMIP. Pada lahan seluas kurang lebih 2000 hektar beroperasi tidak kurang dari 20 tenan (perusahaan) yang mengoperasikan smelter tanpa henti. Disamping itu untuk suplai energi listriknya juga beroperasi 6 unit PLTU yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar dan membuang limbah dan air sisa pendinginnya ke wilayah laut Desa Fatufia.



*Gambar 16 Perkampungan pesisir Desa Fatufia, Sulawesi tengah
(Sumber: Dok. WALHI Sulteng)*

Datang ke perkampungan nelayan Dusun Kurisa Desa Fatufia WALHI Sulteng menemui keluarga nelayan Bapak Haji Rusman dan keluarga Bapak Mashudin. Dua keluarga nelayan yang bermukim kurang dari 1 kilometer dari pelabuhan armada

bongkar muat ore dan batubara serta nikel di kawasan industri PT.IMIP. Dari wawancara dengan dua orang nelayan tersebut diperoleh informasi bahwa sejak PT. BDM beroperasi (tahun 2009) di wilayah tersebut aktivitas budidaya ikan laut mulai terganggu karena pencemaran wilayah laut yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan PT. BDM di Desa Fatufia. Terlebih lagi setelah kehadiran industri pengolahan nikel di kawasan PT. IMIP dengan menggunakan sumber energi PLTU yang membuang limbah air panas di laut Desa Fatufia yang menyebabkan kenaikan suhu air laut yang mencapai 39 derajat celcius. Sehingga berimplikasi terhadap aktivitas keramba jaring ikan dan wilayah tangkap nelayan di wilayah laut Desa Fatufia. Sehingga saat ini mayoritas nelayan yang bertahan di Desa Fatufia harus jauh keluar melaut sampai ke wilayah pulau di Kecamatan Bungku Selatan.

6. Pencemaran lingkungan di wilayah laut tidak hanya disebabkan oleh aktivitas pertambangan dan industri pengolahan nikel. Pertengahan Juni 2020 salah satu tongkang bermuatan ore nikel mengalami kebocoran dan tenggelam di sekitar perairan laut sekitar desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Tongkang yang bermuatan Ore Nikel 10.613.793 MT diketahui ditarik Tug Boat TK Marina 14, terlihat tenggelam dan kandas diatas karang. Disamping karena cuaca buruk tongkang tersebut tenggelam akibat kelebihan kapasitas muatan.

Tongkang milik PT. Marindo Jaya Sejahtera yang dicarter PT. Harum Bumi Mandiri dengan agen PT. Karunia Kembar Maritim ini berangkat dari Jetty Tonia Mitra Sejahtera di Kabaena Sulawesi Tenggara menuju PT. IMIP di Morowali, kemudian kandas di Laut Banda. Tongkang BG Napoleon 002 bermuatan Ore Nikel 10.613.793 MT kandas di bagian kanan tongkang dan terduduk manis di karang di wilayah perairan tersebut.

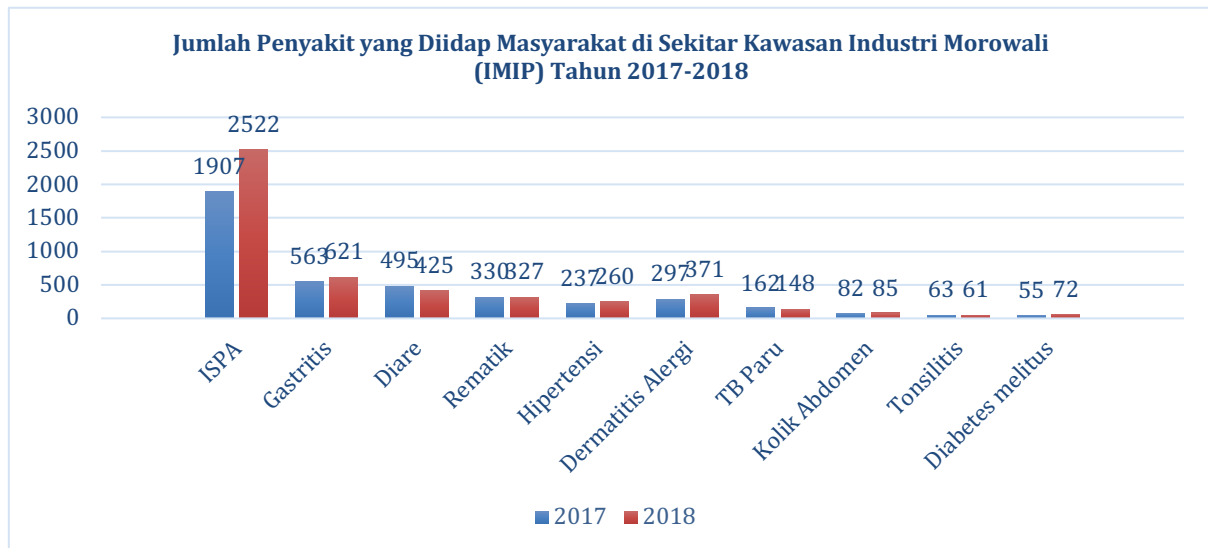
Tumpahan ore tersebut menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut dan terumbu karang. Atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari peristiwa ini, tiga kali Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali melakukan pemanggilan terhadap PT. Marindo Jaya Sejahtera, PT. Harum Bumi Mandiri dan PT. Karunia Kembar Maritim. Namun ketiga perusahaan tersebut tidak menghiraukan dan memberi respon. Meskipun pihak perusahaan telah bertanggung jawab atas desakan Pemerintah Kabupaten Morowali untuk melakukan pemulihan. Namun dapat dipastikan proses pemulihan kerusakan lingkungan laut dan terumbu karang yang ditimbulkan akan berlangsung bertahun-tahun. Terlebih lagi potensi kecelakaan yang sama senantiasa menjadi ancaman. Nyatanya hilir mudik kapal tongkang pengangkut ore tidak pernah berhenti melintasi laut Morowali.

7. Laporan resmi IMIP pada 2017 batubara digunakan PLTU untuk PT. SMI, PT. GCNS dan PT. ITSS mencapai 4 juta ton. Ditahun yang sama konsumsi batubara untuk smelter sebanyak 920 ribu ton, konsumsi batubara terus meningkat sejalan dengan pembangunan-pembangunan baru smelter aneka pabrik dan PLTU di kawasan itu.



*Gambar 17 Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)
(Sumber: Dok. WALHI Sulteng)*

Pembakaran batubara di IMIP tidak bisa dihindari, jadi masalah lingkungan hidup serius. Debu pembakaran batu bara terbawa angin ke pemukiman yang berada tidak jauh dari lokasi pabrik. Fatufia, desa dimana IMIP berada, jadi desa paling merasakan dampak asap batubara. Warga mengatakan, pintu dan jendela rumah harus ditutup rapat jika tidak angin debu batubara masuk ke dalam rumah. Kesehatan jadi masalah, infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) jadi soal utama warga. Data Puskesmas Bahodopi, 52 % warga yang memeriksa kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan milik pemerintah mengidap ISPA.



Grafik 2: Jumlah Pengidap Penyakit Berdasar Kunjungan Pasien di Puskesmas Bahodopi

(Sumber: Puskesmas Bahodopi 2019 – Data April – Desember 2017, dikutip dari Arianto Sangadji & Moh. Fardan 2019)

Dampak Tambang Nikel Bagi Perempuan di Sulawesi Tenggara.

Desa Tapunggya merupakan sebuah desa yang termasuk dalam wilayah administrasi kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara. Luas wilayah desa Tapunggya yakni 118,07 KM² yang dihuni oleh 317 Penduduk, terdiri dari 145 Laki-laki dan 172 Perempuan. Mayoritas pekerjaan masyarakat Tapunggya adalah Buruh perusahaan. Sementara sebagian kecilnya berprofesi sebagai nelayan.

Sejarah Masuknya Tambang Nikel di Desa Tapunggya, Sulawesi Tenggara

Menurut sejarahnya, masyarakat Desa Tapunggya merupakan masyarakat Suku Dalam yang dikenal dengan nama Desa Tapunggya Lama yang berlokasi di sebuah pulau di wilayah Kecamatan Lasolo dan diapit oleh Kali Lasolo dan Laut Lasolo. Karena sulitnya akses terhadap dunia luar, maka pada tahun 1992 masyarakat Suku Dalam mulai menyebar di beberapa wilayah sekitaran Pantai Lasolo. Hingga pada akhirnya melahirkan beberapa desa yakni, Desa Boenaga, Desa Pasir Panjang, Desa Morombo Atas, Desa Labengki, Desa Morombo Pantai, Desa Boedinge, Desa Mowundo, Desa Mandiodo, Desa Tapuemea, Desa Tapunopaka, dan Desa Tapunggya Baru.

Sudah menjadi sesuatu yang tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat yang hidup di sekitar pantai menjadi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Hal ini tentu banyak didapatkan pada cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman masyarakat sekitaran Pantai Lasolo. Berdasarkan pada beberapa masyarakat yang bercerita tentang sejarah masyarakat Tapunggya bahwa sudah menjadi tentu, semua masyarakat Tapunggya asli berprofesi

sebagai nelayan karena lokasi yang dihuni berada diantara Kali Lasolo dan Pantai Lasolo maka hanya profesi sebagai nelayanlah yang dapat dikerjakan. Selain itu, hal lain yang menjadikan masyarakat Tapunggya Lama menjadi nelayan adalah tidak adanya akses jalur darat untuk bersosial dengan masyarakat luar melainkan hanya laut dan perahu sebagai alat untuk mencapai akses terhadap dunia luar.

Aktivitas sebagai nelayan yang digeluti oleh masyarakat Tapunggya menjadikan masyarakat Tapunggya, Jaya pada masanya, masyarakat sering menyebutnya sebagai masa kejayaan. Hasil laut yang melimpah didukung oleh keadaan laut yang bersih menyebabkan masyarakat nelayan Tapunggya dikenal oleh banyak orang. Pasar-pasar di berbagai wilayah, Molawe, Langgikima, Hingga Kendari banyak diisi oleh hasil-hasil laut dari Pantai Lasolo. Dari cerita seorang nelayan, bahwa jauh sebelum tahun 2004 untuk setiap kali melaut, nelayan paling sedikit mendapatkan ikan sebanyak 3 Keranjang besar, dan paling banyak 30 keranjang untuk setiap kali melaut. Hasil-hasil laut tersebut kemudian langsung dijual ke pasar-pasar dan sebagian dikelola untuk dijadikan ikan kering.

Sejak masuknya pertambangan pada tahun 1999 yang dimulai oleh PT. Antam, disusul oleh PT.Cinta Jaya tahun 2004 dan PT. Sriwijaya tahun 2009 menjadikan nelayan tidak lagi dijadikan sebagai Profesi oleh mayoritas masyarakat Tapunggya. Iming-iming Gaji dan status sosial tentang profesi sebagai Buruh perusahaan yang lebih terpendang dibanding profesi sebagai nelayan, menjadikan masyarakat jauh dari laut. Sejak tahun 2004, eksplorasi yang dilakukan oleh PT.Cinta Jaya hingga 2009 oleh PT.Sriwijaya menyerap 90% masyarakat Tapunggya sebagai Buruh perusahaan. Penyerapan tenaga kerja memang sangat masih dilakukan Perusahaan-Perusahaan yang beroperasi di wilayah Tapunggya, namun jika dihitung berdasarkan penghasilan masyarakat, hal itu menjadi lain ceritanya. Sebab menurut cerita beberapa warga yang hidup berpuluh-puluh tahun di wilayah tersebut masyarakat kini kian jauh dari kata sejahtera. Rumah tangga yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, semula berprofesi sebagai nelayan dengan sistem pengelolaan yang cukup baik yakni laki-laki sebagai pengumpul hasil-hasil laut dan perempuan sebagai pengelola hasil laut kini tidak lagi menjadi motor penggerak ekonomi rumah tangga. Karena profesi sebagai buruh hanyalah dikerjakan oleh laki-laki.

Perempuan, seperti di kebanyakan tempat, sudah tentu selalu menjadi Ibu Rumah Tangga, Perempuan Desa Tapunggya salah satunya. Dari 317 Kepala Keluarga, sebanyak 172 sebagai Ibu Rumah Tangga. Tetapi, jika menelusuri cerita yang ada di Desa Tapunggya, hal itu akan berbeda. Jauh sebelumnya, masyarakat desa mulanya hidup sebagai keluarga Nelayan, baik dari Bapak, Ibu, hingga Anak semuanya bekerja untuk mencari dan mengelola hasil-hasil laut. Tidak hanya itu, perempuan juga kadang kala membuat tikar anyaman dari daun Nipa yang diambil dari Hutan sekitaran danau Lasolo. Daun-daun Nipa yang

dikumpulkan kemudian dikeringkan lalu di iris menjadi bahan utama dalam pembuatan tikar anyaman. Hasilnya lalu didistribusikan ke pasar-pasar untuk dijual bahkan kadang kala dibuat menjadi keranjang untuk dijadikan wadah menyimpan hasil-hasil laut. Pada masanya, perempuan menjadi motor penggerak perekonomian Rumah Tangga. Hasil laut dan darat yang terkumpul, semuanya dikelola oleh perempuan. Sejak masuknya pertambangan dan beralihnya profesi kebanyakan Laki-Laki Desa Tapungaya, sejak saat itu, pekerjaan Perempuan Desa Tapungaya menjadi hilang.

Eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang membabat hutan, mencemari laut dan lingkungan menjadikan perempuan terisolasi dari pekerjaannya. Laut yang awalnya bersih dan penuh dengan berbagai macam makhluk hidup, kini tercemar dan tak layak lagi untuk dihuni. Hutan yang awalnya lebat yang dipenuhi dengan tumbuhan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, kini tidak lagi bisa untuk dikenal sebagai hutan. Pohon Nipa, hasil laut, semua kini tidak lagi dapat dijadikan bahan untuk dikelola oleh perempuan. Daun Nipa tidak lagi ada, dan laut tidak menghasilkan apa-apa. Perempuan yang awalnya menjadi motor penggerak perekonomian keluarga, kini terpaksa menetap di rumah sebagai Ibu Rumah Tangga.

Kondisi Ekonomi Masyarakat Lokal di Area Tambang Nikel

Kebanyakan orang menjadikan kestabilan ekonomi sebagai ukuran kesejahteraan. Jika ekonomi stabil, maka itu berarti sejahtera. Gambaran tentang sejarah Masyarakat Tapungaya yang awalnya terdiri dari keluarga-keluarga nelayan lalu menjadi buruh perusahaan adalah sebuah kasus dari kebanyakan kasus.

Kehidupan nelayan yang menjadikan laki-laki sebagai pengumpul hasil-hasil laut dan perempuan sebagai pengelolanya tentu sangat menstabilkan perekonomian keluarga. Dari cerita-cerita masyarakat perempuan Tapungaya, bahwa pada jauh tahun-tahun semasa para laki-laki masih berprofesi sebagai nelayan, perekonomian keluarga sangat baik. Hasil-hasil laut yang dikelola secara berbarengan sangat menjanjikan kesejahteraan hidup masyarakat. Melimpahnya hasil laut, sangat mendukung perekonomian semua keluarga yang ada di Desa Tapungaya.

Namun, hal yang berbeda sejak beralihnya profesi kebanyakan masyarakat, dari nelayan menjadi buruh harian perusahaan. Penghasilan sebagai buruh tidak mampu untuk menghidupi keluarga selama sebulan. Pendapatan buruh perusahaan untuk setiap bulannya hanya sampai pada Rp.2.500.000. Jika dihitung untuk biaya pengeluaran rumah tangga, maka hal itu tidak akan cukup. Berbeda halnya dengan saat-saat masih menjadi nelayan. Untuk setiap kali melaut, pendapatan paling sedikit Rp.300.000. Jika dalam sehari dua kali melaut, maka itu berarti sebanyak Rp.600.000, pendapatan dalam sehari.

Menurunnya pendapatan keluarga tentunya, juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sumber daya alam yang ada di Desa Tapunggay. Sumber daya alam yang melimpah ruah pada masanya, dimanfaatkan dan dikelola oleh perempuan Tapunggay. Hal itu dibuktikan dengan cerita-cerita yang tersebar di masyarakat bahwa perempuan, pada waktu kondisi hutan masih baik, banyak mengumpulkan daun-daun Nipa untuk dianyam menjadi tikar lalu didistribusikan ke pasar-pasar. Hal itu juga menjadi salah satu sumber penyokong perekonomian yang ada, dan tentu selain itu juga hasil-hasil laut dikelola oleh perempuan pada waktu itu.

Namun, sejak masuknya perusahaan pertambangan, hal tersebut menjadi tidak lagi bisa dilakukan oleh perempuan. Selain karena kondisi laut yang tidak lagi bisa dihuni oleh makhluk hidup, juga dikarenakan kondisi hutan yang tidak lagi memungkinkan untuk ditumbuhi pohon-pohon Nipah sebagai bahan pokok pembuatan tikar anyaman.

Utara Sulawesi, Pintu Gerbang Pasifik dan Ancaman Ekspansi Industri Ekstraktif Pertambangan.

Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota terletak di kota Manado. Sulawesi Utara atau Sulut berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudera Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan provinsi Davao del Sur (Filipina) di sebelah utara. Penduduk Sulawesi Utara pada tahun 2020 berjumlah 2.506.981 jiwa. Luas wilayah Sulawesi Utara adalah 15.271 km². Sulawesi Utara memiliki kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 287 pulau dengan 59 diantaranya berpenghuni. Wilayah administratif Sulawesi Utara terbagi menjadi 4 kota dan 11 kabupaten dengan 1.664 desa/kelurahan. Sulawesi Utara terbagi menjadi dua zona yaitu zona selatan yang berupa dataran rendah dan dataran tinggi serta zona utara yang meliputi kepulauan. Zona ekonomi eksklusif Sulawesi Utara mencapai 190.000 km² dengan pesisir pantai sepanjang 2.395,99 km dan luas hutan mencapai 701.885 hektare. Wilayah Sulawesi Utara juga memiliki banyak gunung berapi.

Kondisi geografi, geoposisi, hingga geostrategi Sulawesi Utara (Sulut) menjadikan daerah ini berpotensi menjadi Pintu Gerbang Pasifik, dengan beberapa mega proyek yang sangat mengancam kehidupan sosial, ekonomi budaya, perempuan dan lingkungan hidup Sulawesi Utara. Salah satu bukti nyata proyek yang sangat fantastis yang akan merubah kehidupan sosial masyarakat saat ini adalah proyek prioritas nasional untuk mendukung industri, pembangunan dan pengembangan pariwisata, antara lain melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Likupang dengan luas kurang lebih dua ribu hektar, dan total investasi berkisar Rp 8,1 triliun rupiah. Hal ini pun berlaku di Kota Bitung sebagai pintu gerbang Asia Pasifik nanti, Bitung masuk dalam kota prioritas pembangunan hal ini ditunjukkan lewat proyek KEK Bitung yang akan menjadikan Kota Bitung sebagai kota tersibuk di Sulawesi Utara, dan

akan mengubah pola kehidupan masyarakat disana karena akan banyak orang asing akan berdatangan disana.

Di Kota Bitung juga akan dibangun pusat-pusat perkantoran baik pusat perkantoran milik pemerintah Indonesia tapi juga pusat perkantoran bisnis Warga Negara Asing. Pelabuhan Hubung Internasional terbesar di Indonesia Timur sementara di bangun disana untuk mendukung setiap Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan target sebagai kota tersibuk di Indonesia Timur karena merupakan pintu masuk asia pasifik. Disamping itu, keberadaan Pelabuhan Bitung juga akan mendukung kegiatan industri kawasan timur Indonesia meliputi Ambon dan Ternate (pertanian, industri, dan pertambangan) serta Samarinda, Balikpapan, Tarakan, dan Nunukan (batubara, minyak bumi, dan kayu lapis).

Dengan gambaran bahwa Provinsi Sulawesi Utara sebagai kota eksport import nantinya, masyarakat Kota Bitung dan Sulawesi Utara pada umumnya akan sangat merasakan dampak dari perubahan tatanan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup. Sumber-sumber kehidupan masyarakat local pasti akan terganggu, akses perempuan terhadap sumber daya alam juga akan sangat tidak mudah lagi, pola pikir perempuan tentang sumber daya alam juga akan berubah, karena lebih melihat pada kemajuan industri serta kebudayaan masyarakat adat dalam melindungi hutan pasti akan tergeser dan akan tergusur akibat dari kemajuan pembangunan dan industri di Sulawesi Utara.

Industri Nikel di Indonesia salah satunya yang akan mempengaruhi perubahan tatanan kehidupan masyarakat Sulawesi Utara. Presiden Jokowi sudah mengeluarkan aturan terkait dengan percepatan-percepatan industry nikel di Indonesia, khususnya di Pulau Sulawesi. Hal ini dibuktikan dengan kesiapan Presiden Joko Widodo melawan Gugatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam kesempatan itu Joko Widodo menegaskan kepada semua pihak untuk tidak melewatkan kesempatan mengelola barang tambang sendiri.

Upaya-upaya dari pemerintah tersebut tidak bebas dari ancaman Kerusakan Hutan, Lingkungan, Pelanggaran HAM serta kemiskinan terstruktur bagi kaum Perempuan dan Anak di Pulau Sulawesi. Ancaman-ancaman di atas akan terus meningkat, apalagi Jokowi telah mengeluarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan yang ada di Indonesia. Imbasnya perusahaan tambang akan semakin agresif mengeruk bahan baku berupa nikel di Tanah, Pulau Sulawesi. Oleh sebab itu perlu ada kampanye besar-besaran di Sulawesi Utara terkait dengan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam juga perlu ada pengetahuan yang kuat kepada perempuan dan masyarakat umum terkait dengan cara dan tujuan dari pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan sumber-sumber penghidupan masyarakat serta habitat hewan-hewan yang dilindungi di Sulawesi Utara

sehingga terbentuk masyarakat yang berdaulat, sadar dan bertindak memperjuangkan sumber daya alam dan sumber-sumber kehidupan mereka.

PT. Tambang Mas Sangihe Sulawesi Utara



Gambar 18 Peta Konsesi Pertambangan di Pulau Sangihe (Sumber: Dok. WALHI Sulut)

Keadaan Sosial

Berabad-abad lamanya masyarakat Sangihe selalu mensyukuri dan menyesuaikan diri dengan anugerah Sang Pencipta atas daerah ini. Warga Sangihe bersyukur dan menggantungkan kehidupannya kepada sumber daya alam yang melimpah di laut sebagai nelayan dan di daratan Pulau sebagai petani. Sistem bertani kebun campur adalah tradisi turun temurun yang menjadikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan situasi itu, masyarakat hidup nyaman, tentram dan damai memelihara adat istiadat yang harmonis dalam kerukunan.

Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan, Masyarakat dan Biodiversity.

Namun sekarang, keadaan nyaman, tentram dan damai tersebut diusik oleh IZIN TAMBANG yang dikeluarkan Dirjen Minerba ESDM Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 kepada PT. Tambang Mas Sangihe (TMS). Luas izin 42.000 Hektar atau lebih dari setengah Pulau Sangihe. Artinya, Pulau Sangihe akan dibongkar secara terbuka dan massif selama 33 tahun (2021-2054). Ada 80 Desa dari 7 Kecamatan di Kabupaten Sangihe serta Hutan Sahendarumang terancam digusur. Perkampungan, sekolah-sekolah, rumah-rumah ibadah serta adat istiadat berpotensi tinggal kenangan. Hendak dikemanakan 57.000 rakyat dari 80 kampung tersebut. Apakah Pulau Sangihe sanggup menahan beban perubahan bentang alam.

Selain itu, 40 juta ton material akan dikeruk dan diambil emasnya dengan menggunakan bahan kimia B3 atau Bahan Beracun Berbahaya. Dalam mengekstraksi emas, akan terekstraksi mineral lain yang sebelumnya stabil dalam perut bumi seperti *mercury*, *cadmium*, *arsenik*, dan lain-lainnya akan dibuang sebagai limbah. Hutan, kebun, perkampungan, rumah-rumah ibadah, sekolah, dan lain-lainnya akan diganti dengan limbah beracun. Selain tergusurnya 57.000 penduduk yang kebanyakannya adalah **perempuan dan anak** dari 80 Kampung dari areal pemukiman, hilang pula mata pencaharian petani dan nelayan karena rusaknya perairan tangkap nelayan tradisional di sepanjang pantai di sekitar areal

pertambangan. Artinya, Izin tambang emas tersebut hanya akan memiskinkan masyarakat Sangihe. Itu artinya akan terjadi pelanggaran HAM.

Pemerintah dan Rakyat Kabupaten Kepulauan Sangihe Bertekad dengan Tegas Menolak PT.TMS di Sangihe.

UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tegas mengatur bahwa pulau dengan luas daratan kurang dari 2000 km² dikategorikan sebagai pulau kecil dan dilarang oleh Pasal 35 huruf k UU No. 1 Tahun 2014 untuk ditambang. Dan oleh Pasal 26A UU No. 1 Tahun 2014, tanpa Izin Pemanfaatan Pulau dari Menteri Kelautan dan Perikanan, PT. TMS tidak boleh beroperasi di Pulau Sangihe. Dan PT. TMS tidak memiliki Izin Pemanfaatan Pulau dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Jika PT.TMS beroperasi, pelanggaran HAM akan terjadi di Pulau Sangihe.

Eksansi Pertambangan Nikel Dan Penghancuran Ruang Hidup Rakyat.

Praktik aktivitas pertambangan di Indonesia khususnya di Luwu timur, Provinsi Sulawesi selatan sendiri selama ini sangat dekat dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, pada tahap awal penentuan lokasi izin usaha pertambangan pengambilan keputusan atas wilayah-wilayah pertambangan tidak pernah dilakukan secara partisipatif bersama dengan masyarakat adat/komunitas lokal yang telah lebih dulu ada di wilayah tersebut. sosialisasi dan konsultasi yang dilakukan perusahaan pertambangan sering kali hanya sebatas pemenuhan syarat untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Hal ini kemudian memicu pelanggaran HAM pada proses selanjutnya, penetapan wilayah konsesi pertambangan melalui izin usaha pertambangan (IUP) kemudian merampas tanah-tanah milik masyarakat yang menetap di wilayah tersebut, seperti yang terjadi pada kasus perampasan tanah masyarakat adat Karunsi'e yang berada di wilayah utara konsesi PT.Vale Indonesia. tanah-tanah adat yang dikelola oleh masyarakat kemudian diklaim sebagai milik perusahaan berlandaskan izin usaha pertambangan (IUP). Kondisi tersebut memicu pelanggaran HAM dan konflik yang berimbas pada praktik-praktik kekerasan dan intimidasi aparat terhadap masyarakat adat.

Konflik yang terjadi berkembang lebih luas di antara masyarakat itu sendiri. resolusi konflik yang dilakukan pihak perusahaan pertambangan kerap menggunakan politik uang dengan dalih ganti rugi kepada satu kelompok masyarakat yang dinilai mampu meminimalisir gerakan pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengan tujuan perusahaan. cara-cara instan yang dilakukan perusahaan tambang nikel seperti ini kerap kali melahirkan konflik di antara masyarakat yang berkepanjangan.

Pada tahapan operasi produksi, pelanggaran Hak Asasi Manusia terus berlanjut, pengelolaan yang buruk atas limbah bekas tambang, hingga polusi debu di wilayah pemukiman masyarakat yang menjadi jalur distribusi hasil pertambangan, tidak pernah benar-benar

dipedulikan oleh pihak penambang. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat seperti yang diamanatkan UUD 1945 Pasal 28H telah benar-benar dirampas oleh aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi. hal ini terlihat jelas melalui praktik pengelolaan limbah pada sebagian besar perusahaan pertambangan nikel di Sulawesi Selatan, seperti pencemaran yang dilakukan PT. Prima Utama Lestari, dan PT. Citra Lampia Mandiri. Bahkan pada perusahaan seperti PT. Vale Indonesia yang berkali-kali mendapatkan penghargaan terbaik dalam pengelolaan lingkungan dari kementerian energi dan sumber daya mineral pemerintah republik Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut masih saja menumpahkan limbah berupa sedimen bekas tambang, sulfur atau zat-zat berbahaya lainnya ke ekosistem-ekosistem penting yang merupakan sumber penghidupan masyarakat, seperti danau, sungai hingga pesisir dan laut.

Pada tahapan akhir aktivitas pertambangan di Indonesia pada umumnya, tanggung-jawab atas pemulihan lingkungan seringkali diabaikan, lahan-lahan yang telah gundul akibat aktivitas pertambangan ditinggalkan begitu saja menyisakan ancaman bencana bagi masyarakat yang berada di wilayah lingkaran tambang.

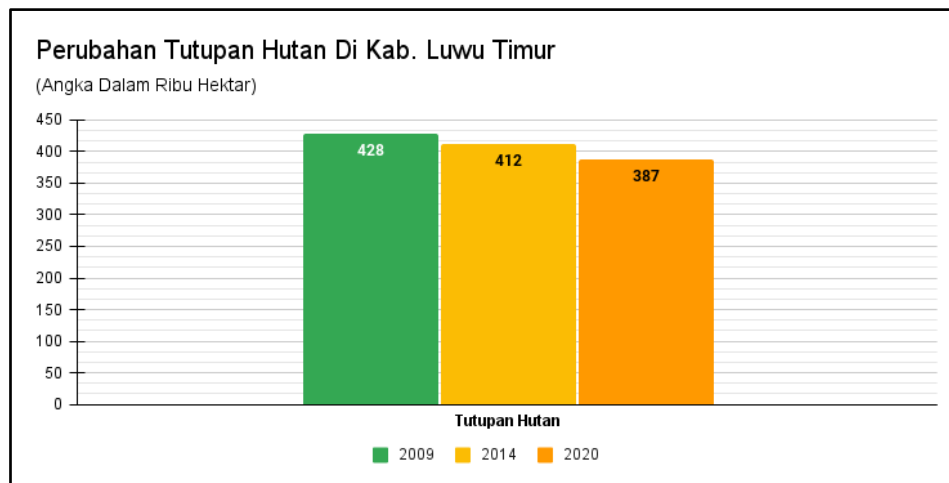
Deretan proses aktivitas pertambangan di atas dalam catatan WALHI Sulawesi Selatan kerap kali terjadi terutama pada perusahaan-perusahaan cangkang yang memiliki induk dan jaringan besar baik pada skala nasional maupun internasional. Praktik-praktik perusakan lingkungan selalu berujung pada pelanggaran HAM tidak hanya bagi masyarakat yang tinggal di dalam wilayah lingkaran tambang, namun hingga ke seluruh jalur distribusi pertambangan.

Dampak dari aktivitas pertambangan nikel yang terjadi selama 1 dekade terakhir memperlihatkan buruknya tata kelola pertambangan nikel di Indonesia, khususnya di kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. tingginya tingkat deforestasi dan pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pihak perusahaan pertambangan yang diakomodir oleh negara semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat adat dan masyarakat lokal yang hidup dan beraktivitas di wilayah hutan.

Ambisi pemerintah menjadi produsen nikel terbesar di dunia dengan memanfaatkan isu transisi energi ke energi baru terbarukan ini melahirkan berbagai dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan seperti pengkaplingan wilayah hutan, deforestasi, pencemaran lingkungan dan perampasan ruang-ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal yang berada dalam dan sekitar kawasan hutan.

Industri pertambangan nikel di Pulau Sulawesi telah melahirkan berbagai bencana sosial-ekologis bagi masyarakat dan lingkungan. Ambisi pemerintah menjadi produsen nikel terbesar di dunia dengan memanfaatkan isu transisi energi yang tengah hangat saat ini.

Dengan semakin masifnya pemberian izin-izin tambang baru dalam upaya menggenjot produksi nikel, Tutupan hutan di kabupaten luwu timur juga terus tergerus, berdasarkan data kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setidaknya ada 41 ribu hektar luas tutupan hutan telah beralih fungsi sejak tahun 2009 hingga 2020. Hilangnya fungsi hutan merupakan titik awal bencana ekologi terjadi di luwu timur. Menurunnya tingkat biodiversitas Kawasan, hingga hilangnya ruan-ruang hidup masyarakat adat / komunitas lokal yang selama ini tinggal di dalam dan sekitar Kawasan hutan dengan bergantung kepada ekosistem hutan yang lestari.



*Diagram 5 Perubahan Tutupan Hutan Kabupaten Luwu Timur Sejak Tahun 2009 – 2020
(Sumber: Sistem Monitoring Hutan Nasional KLHK)*

Penutup dan Kesimpulan

Pada Leader Summit, KTT Perubahan iklim yang ke-26 (COP26), di Glasgow, UK, Presiden Jokowi, secara tegas menyampaikan bahwa ada “ekosistem nikel” di Indonesia. Tidak diketahui apa arti dari kata “ekosistem nikel” tersebut, namun menurut kami, pernyataan itu adalah pesan Presiden Indonesia untuk mengajak dunia, terutama pelaku usaha, khususnya pengusaha tambang untuk berinvestasi dan mengembangkan industri nikel di Indonesia. Sementara, potensi nikel di Indonesia ada di dalam tanah yang permukaannya merupakan bentang alam hutan tropis yang sangat esensial bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Dengan demikian, secara nyata bahwa bentang alam hutan, sungai dan laut di Sulawesi sedang terancam ekspansi tambang nikel.

Ekspansi dari pertambangan nikel hingga saat ini saja telah memberikan begitu banyak dampak buruk bagi lingkungan, perempuan, masyarakat lokal/adat, di seluruh wilayah yang dijadikan zona pertambangan khususnya nikel. Seperti yang telah diuraikan diatas, Industri pertambangan nikel di Pulau Sulawesi memiliki begitu banyak sisi gelap akan pengrusakan lingkungan, pelanggaran HAM, perampasan wilayah kelola masyarakat adat/lokal, hingga pemiskinan terstruktur bagi kaum perempuan

Di Sulawesi selatan sebagian besar wilayah pertambangan berada pada bagian hulu yang memiliki tutupan vegetasi diatas 30% dan memiliki peran selayaknya hutan, walau beberapa ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Berada diluar kawasan hutan. dengan diterbitkannya izin usaha pertambangan di wilayah-wilayah tersebut fungsi hutan kemudian beralih menjadi daerah pertambangan, kerusakan kawasan tersebut kemudian mengancam ekosistem hutan hujan tropis Sulawesi. Tidak sampai disitu keberadaan 3 Danau purba yang sepatutnya di jaga di wilayah ini juga ikut terdampak. Kemudian dampak yang lain dari aktivitas tambang nikel di Sulawesi Selatan adalah pencemaran sungai hingga laut yang merusak habitat flora dan fauna serta merugikan masyarakat, terkhusus perempuan setempat.

Endapan lumpur tambang di Laut Lampia akibat tambang nikel di hutan telah merusak pertumbuhan terumbu karang dan biota laut lainnya seperti sponsia dan rumput laut. Para nelayan Lampia mengatakan bahwa banyak terumbu karang dan sponsia mati akibat pencemaran lumpur tambang nikel. Hal ini disebabkan karena jumlah lumpur yang masuk mencemari dan mengendap di dasar laut sudah sangat banyak. Masyarakat memperkirakan pencemaran di laut lampia telah terjadi sejak tahun 2019.

Di Sulawesi Tengah, pencemaran pada pesisir dan laut di wilayah lingkaran tambang terus terjadi dan semakin meluas. Sebagaimana diungkapkan nelayan desa Lafeu Hafid mengungkapkan bahwa dahulu sebelum kehadiran perusahaan tambang di sekitar Desa Lafeu dan secara umum, dulunya (sebelum ada tambang dan smelter) nelayan di wilayah Kecamatan Bungku Pesisir dapat menghasilkan tangkapan yang sangat melimpah hingga berton-ton hanya dalam satu hari. Jenis ikannya pun bermacam-macam sesuai dengan musimnya. Namun setelah kehadiran perusahaan tambang di wilayah tersebut tangkapan ikan terus menurun dan sampai saat ini ikan-ikan laut di Desa Lafeu tidak lagi bisa berkembang biak seperti dulu. Senada dengan nelayan Desa Lafeu, Ahsan nelayan dari Desa Torete juga mengungkapkan Dampak buruk dari industri pertambangan nikel di desanya begitu besar, ia bercerita, dahulu pada tahun 2007 sampai 2010 nelayan Desa Torete sangat mudah mendapatkan ikan, cukup di sekitar desa saja. Di dekat muara sungai saja pada saat air pasang mereka sudah bisa menangkap ikan putih dan ikan kakap merah yang cukup besar. Namun saat ini menurutnya para nelayan harus jauh melaut untuk bisa menangkap ikan.

Kemudian, di Desa Laroenai endapan lumpur yang berakibat pada kerusakan hutan mangrove yang sudah mencapai kedalaman 2 sampai 6 meter. Kerusakan hutan mangrove tersebut berimplikasi terhadap kehilangan salah satu sumber mata pencaharian warga Desa Laroenai yang dulunya memanfaatkan lokasi hutan mangrove tersebut sebagai tempat budidaya kepiting.

Pencemaran dari aktivitas pertambangan nikel juga dirasakan masyarakat Desa Labota, Sulawesi Tengah. Menurut keterangan warga, saat ini PT. IMIP sedang melakukan pembangunan pelabuhan bongkar muat untuk kebutuhan pabrik baterai lithium yang rencananya akan dibangun di desa tersebut. Dari keterangan salah seorang nelayan Desa Labota Yusuf (35) diperoleh informasi bahwa wilayah pesisir dan laut di Desa Labota sudah tercemar lumpur dan limbah pertambangan dan berminyak. Menurutnya air laut berminyak diduga karena adanya tumpahan minyak dari kapal pengangkut ore dan batu bara. tidak jauh berbeda dengan kondisi desa pesisir lainnya Di Desa Fatufia tempat dimana PT. BDM beroperasi (Sejak tahun 2009) di wilayah tersebut aktivitas budidaya ikan laut mulai terganggu karena pencemaran wilayah laut yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan PT. BDM di Desa Fatufia. Terlebih lagi setelah kehadiran industri pengolahan nikel di kawasan PT. IMIP dengan menggunakan sumber energi PLTU yang membuang limbah air panas di laut Desa Fatufia yang menyebabkan kenaikan suhu air laut yang mencapai 39 derajat celsius. Sehingga berimplikasi terhadap aktivitas keramba jaring ikan dan wilayah tangkap nelayan di wilayah laut Desa Fatufia. Sehingga saat ini mayoritas nelayan yang bertahan di Desa Fatufia harus jauh keluar melaut sampai ke wilayah pulau di Kecamatan Bungku Selatan.

Pencemaran lingkungan di wilayah laut tidak hanya disebabkan oleh aktivitas pertambangan dan industri pengolahan nikel. Pertengahan Juni 2020 salah satu tongkang bermuatan ore nikel mengalami kebocoran dan tenggelam di sekitar perairan laut sekitar desa Bete-Bete Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali. Tongkang yang bermuatan Ore Nikel 10.613.793 MT diketahui ditarik Tug Boat TK Marina 14, terlihat tenggelam dan kandas diatas karang. Tongkang milik PT. Marindo Jaya Sejahtera yang dicarter PT. Harum Bumi Mandiri dengan agen PT. Karunia Kembar Maritim ini berangkat dari dari Jetty Tonia Mitra Sejahtera di Kabaena Sulawesi Tenggara menuju PT. IMIP di Morowali, kemudian kandas di Laut Banda. Tongkang BG Napoleon 002 bermuatan Ore Nikel 10.613.793 MT kandas di bagian kanan tongkang dan terduduk manis di karang di wilayah perairan tersebut.

Selain dari aktivitas industri pertambangan nikel, masyarakat lokal/adat juga dihadapkan pada ancaman baru yang sama buruknya. Ekspansi pertambangan nikel dan pengolahannya yang membutuhkan energi besar mendorong dibangunnya PLTU untuk suplai energi ke pabrik pengolahan nikel. Laporan resmi IMIP pada 2017 batubara digunakan PLTU untuk PT. SMI, PT. GCNS dan PT. ITSS mencapai 4 juta ton. Ditahun yang sama konsumsi batubara untuk smelter sebanyak 920 ribu ton. konsumsi batubara kedepan akan terus meningkat sejalan dengan pembangunan-pembangunan smelter baru dan aneka pabrik dan PLTU di kawasan itu. Desa Fatufia, tempat dimana IMIP berada, menjadi desa paling merasakan dampak asap batubara. Warga mengatakan, pintu dan jendela rumah harus ditutup rapat jika tidak angin debu batubara masuk ke dalam rumah. Kesehatan jadi masalah, infeksi saluran pernafasan

atas (ISPA) jadi soal utama warga. Data Puskesmas Bahodopi, 52 % warga yang memeriksa kesehatan di fasilitas-fasilitas kesehatan milik pemerintah mengidap ISPA.

Pemiskinan terhadap perempuan akibat dari pertambangan nikel juga terjadi di Sulawesi Tenggara tepatnya di Desa Tapungaya, masyarakat desa yang mulanya hidup sebagai keluarga nelayan, baik dari bapak, Ibu, hingga Anak semuanya bekerja untuk mencari dan mengelola hasil-hasil laut. Tidak hanya itu, perempuan juga kadang kala membuat tikar anyaman dari daun Nipa yang diambil dari Hutan sekitaran danau Lasolo. Daun-daun Nipa yang dikumpulkan kemudian dikeringkan lalu di iris menjadi bahan utama dalam pembuatan tikar anyaman. Hasilnya lalu didistribusikan ke pasar-pasar untuk dijual bahkan kadang kala dibuat menjadi keranjang untuk dijadikan wadah menyimpan hasil-hasil laut.

Pada masanya, perempuan menjadi motor penggerak perekonomian Rumah Tangga. Hasil laut dan darat yang terkumpul, semuanya dikelola oleh perempuan. Sejak masuknya pertambangan dan beralihnya profesi kebanyakan Laki-Laki Desa Tapungaya, sejak saat itu, pekerjaan Perempuan Desa Tapungaya menjadi hilang. Eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang membabat hutan, mencemari laut dan lingkungan menjadikan perempuan terisolasi dari pekerjaannya. Laut yang awalnya bersih dan penuh dengan berbagai macam makhluk hidup, kini tercemar dan tak layak lagi untuk dihuni. Hutan yang awalnya lebat yang dipenuhi dengan tumbuhan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, kini tidak lagi bisa untuk dikenal sebagai hutan. Pohon Nipa, hasil laut, semua kini tidak lagi dapat dijadikan bahan untuk dikelola oleh perempuan. Daun Nipa tidak lagi ada, dan laut tidak menghasilkan apa-apa. Perempuan yang awalnya menjadi motor penggerak perekonomian keluarga, kini terpaksa menetap di rumah sebagai Ibu Rumah Tangga.

Sisi gelap industri pertambangan nikel di pulau Sulawesi tidak sebatas di sekitar wilayah lingkaran tambang, jauh di sebelah utara tepatnya di kota Bitung, saat ini telah dibangun kawasan ekonomi Khusus Bitung, berbagai pembangunan kawasan perkantoran hingga pariwisata dibangun karena kondisi geografis Kota Bitung yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai pintu gerbang Indonesia ke kawasan Asia-Pasifik. Dengan gambaran bahwa Provinsi Sulawesi Utara sebagai kota ekspor import nantinya, masyarakat Kota Bitung dan Sulawesi Utara pada umumnya akan sangat merasakan dampak dari perubahan tatanan kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup. Sumber-sumber kehidupan masyarakat lokal pasti akan terganggu. Akses perempuan terhadap sumber daya alam juga akan sangat tidak mudah lagi. Pola pikir perempuan tentang sumber daya alam juga akan berubah, karena lebih melihat pada kemajuan industri ketimbang menjaga kebudayaan masyarakat adat dalam melindungi hutan. Kearifan masyarakat adat dan lokal pasti akan tergeser dan akan tergusur akibat dari kemajuan pembangunan dan industri di Sulawesi Utara.

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus tersebut tidak lepas dari rantai pasok komoditas nikel di seluruh pulau Sulawesi saat ini. Sebagian besar produksi nikel di wilayah ini dikirim ke Jepang dan Cina melalui wilayah tersebut. Pembangunan kawasan ekonomi di wilayah utara pulau Sulawesi jelas diproyeksikan akan semakin mempercepat ekspansi dari pertambangan nikel di seluruh daratan Sulawesi.

Selamatkan Hutan Tropis dan Masyarakat Sulawesi

Ambisi pemerintah untuk menjadi produsen baterai terbesar di dunia yang kemudian terus mendorong berkembangnya industri pertambangan nikel di Indonesia, terkhusus di Sulawesi merupakan peringatan (alarm) bagi keberlanjutan lingkungan dan perlindungan HAM. Alarm terkait adanya ancaman dampak tambang terhadap kelestarian hutan hujan Sulawesi dan hak-hak masyarakat adat/lokal. Masyarakat di pulau Sulawesi, maupun di Indonesia dan di seluruh dunia, baik tua, muda, perempuan dan laki-laki harus bersama-sama berjuang untuk menyelamatkan hutan hujan tropis di Sulawesi. Dengan mendukung menyelamatkan hutan tropis di Sulawesi, maka kita berkontribusi melindungi kehidupan jutaan orang yang mendapatkan manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari fungsi ekologis hutan hujan Sulawesi.

Kerusakan akibat dampak tambang yang telah terjadi hingga akhir tahun 2021, merupakan bukti nyata bagi dunia, bagi pemerintah, untuk segera menghentikan penerbitan izin-izin usaha pertambangan baru di Sulawesi. Pemerintah juga harus meninjau ulang izin-izin tambang yang telah diterbitkan. Melakukan pemulihan lingkungan dan menjamin hak-hak masyarakat terpenuhi. Saat ini upaya harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah di Sulawesi untuk menyelamatkan dan melindungi bentang alam hutan dan bentang kehidupan di Pulau Sulawesi. Dampak dan ancaman kerusakan lingkungan, kehilangan hutan hujan tropis, pelanggaran HAM, hingga pemiskinan rakyat, terutama perempuan, akibat ekspansi industri pertambangan nikel nyata terjadi dan tidak dapat diabaikan lagi. Saatnya untuk segera menghentikan ekspansi pertambangan nikel di Sulawesi. Saatnya untuk segera mengambil tindakan melindungi bentang alam serta menjamin perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat / lokal di Sulawesi.

[selesai]

Daftar Pustaka

- Data Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan - Geoportal Kementerian ESDM, <https://geoportal.esdm.go.id/minerba/> (Diakses 21 Desember 2021)
- Booklet Peluang Investasi Nikel Indonesia, Kementerian ESDM. (2020), <https://www.esdm.go.id/id/booklet/booklet-tambang-nikel-2020> (Diakses 20 Desember 2021)
- Global Electric Vechiles Outlook (2020). <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020> (Diakses 18 Desember 2021)
- Syarif. (2021). APNI Dorong Optimalisasi – Implementasi Tata Kelola Nikel Dalam Rangka Mendukung Industri Hilir Nikel, Stainless Steel & Baterai. <https://nikel.co.id/apni-dorong-optimalisasi-implementasi-tata-kelola-nikel-dalam-rangka-mendukung-industri-hilir-nikel-stainless-steel-baterai/> (diakses, 20 Desember 2021)
- Live Streaming Webinar Masa Depan Hilirisasi Nikel Kementerian ESDM, <https://www.youtube.com/watch?v=GAuRNNy3lXA> (Diakses 21 Desember 2021)
- Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2020, <https://geoportal.menlhk.go.id/~appgis/publikasi/Buku/Buku%20REKALKULASI%20PENUTUPAN%20LAHAN%20INDONESIA/Rekalkulasi%20Penutupan%20Lahan%202020.pdf> (Diakses, 21 Desember 2021)
- Presentasi Webinar, Masa Depan Hilirisasi Nikel Kementerian ESDM (2020), <https://drive.google.com/drive/folders/1t2TOaKCgbCvovH9ThVNdxfsDOvZuGhQB> (Diakses, 20 Desember 2021)
- Data Series Perubahan Tutupan Hutan, Sistem Monitoring Hutan Nasional - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <https://nfms.menlhk.go.id/statistic> (Diakses 18 Desember 2021)